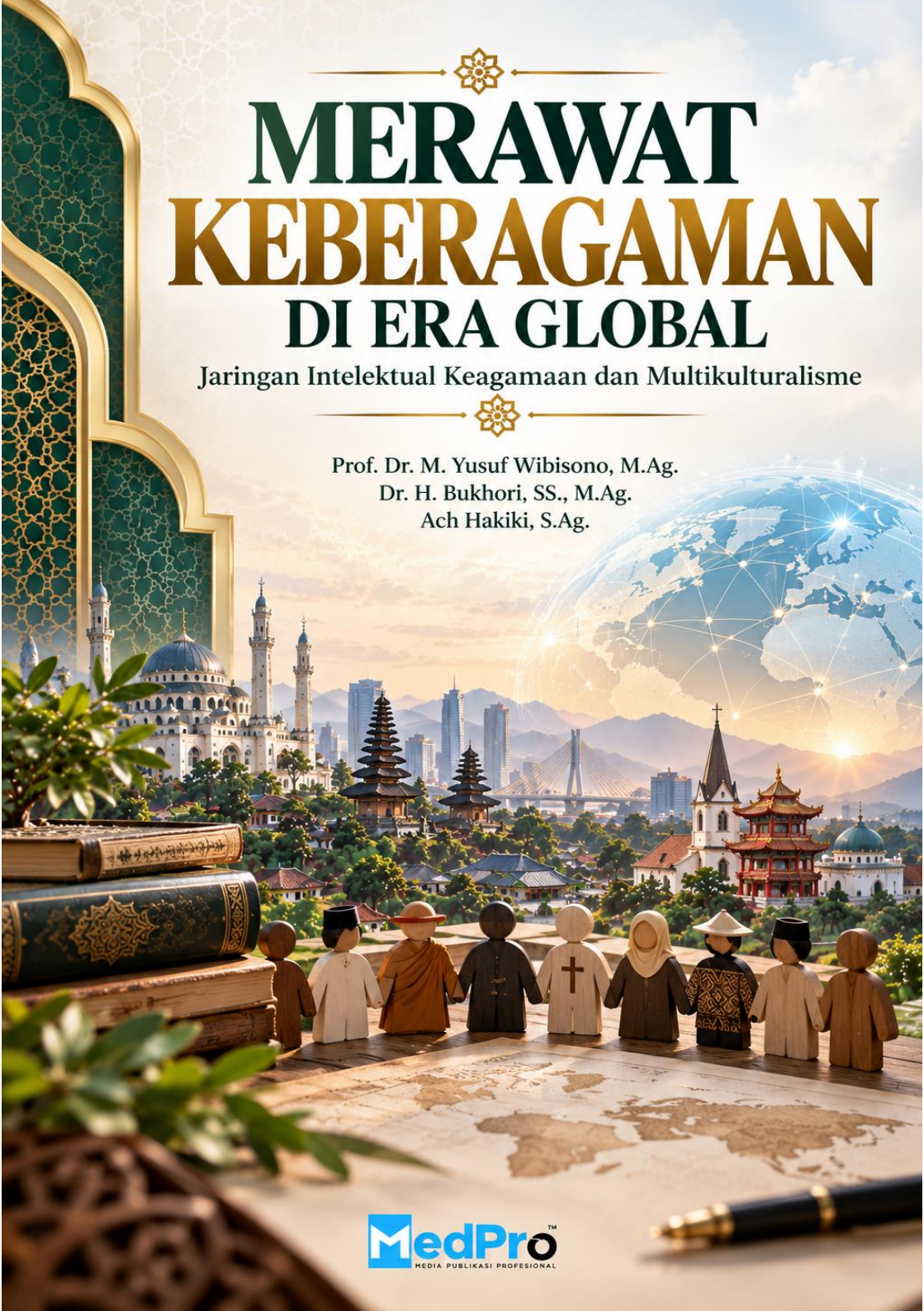
MERAWAT KEBERAGAMAN DI ERA GLOBAL

Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme

Prof. Dr. M. Yusuf Wibisono, M.Ag.
Dr. H. Bukhori, SS., M.Ag.
Ach Hakiki, S.Ag.



MedPro™
MEDIA PUBLIKASI PROFESIONAL

MERAWAT KEBERAGAMAN DI ERA GLOBAL

Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme

Prof. Dr. M. Yusuf Wibisono, M.Ag.
Dr. H. Bukhori, SS., M.Ag.
Ach Hakiki, S.Ag.

MedPro™
MEDIA PUBLIKASI PROFESIONAL

Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.

MERAWAT KEBERAGAMAN DI ERA GLOBAL

Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme

Penulis:
Prof. Dr. M. Yusuf Wibisono, M.Ag.
Dr. H. Bukhori, SS., M.Ag.
Ach Hakiki, S.Ag.

Penyunting:
Muhammad Haikal As-Shidqi

Penata Sampul:
Neng Wita Nursaadah Fitriah

Penata Letak:
Ahmad Sabatino Zamzami

ISBN:
978-634-05-7463-0

DOI:
http://doi.org/10.57032/978-634-05-7463-0

Hak Cipta © 2026
Hak cipta dilindungi undang undang
Dilarang mengutip, menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.
Cetakan pertama, tahun 2026
Diterbitkan oleh **CV. Media Publikasi Profesional**
Pasirjati, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40616
Email: media.publikasiprofesional@gmail.com
Website: https://www.medpro.web.id

KATA PENGANTAR

Keberagaman merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan agama, budaya, tradisi, orientasi pemikiran, dan pengalaman sosial bukan sekadar fakta demografis, tetapi bagian dari dinamika kehidupan bersama yang terus berubah. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital, perjumpaan dengan perbedaan semakin intens, sementara tantangan untuk menjaga komunikasi, kepercayaan, dan kohesi sosial juga menjadi semakin kompleks.

Buku ***Merawat Keberagaman di Era Global: Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme*** hadir di tengah kebutuhan tersebut. Buku ini tidak hanya membicarakan keberagaman sebagai sebuah konsep normatif, tetapi mengajak pembaca melihat bagaimana perubahan global, otoritas keagamaan, jaringan intelektual, media digital, budaya lokal, dan kehidupan masyarakat urban saling berinteraksi dalam membentuk cara masyarakat memahami dan menjalani perbedaan.

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada perhatian yang diberikan kepada jaringan intelektual keagamaan. Dalam masyarakat yang semakin terhubung, produksi dan penyebaran pengetahuan keagamaan tidak lagi berlangsung melalui satu jalur. Perguruan tinggi, pesantren, organisasi keagamaan, komunitas, tokoh agama, akademisi, generasi muda, dan media digital membentuk simpul-simpul pengetahuan yang terus berkembang. Jaringan tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, dialog, serta kolaborasi sosial apabila mampu dikelola secara terbuka dan berkelanjutan.

Buku ini juga mengingatkan bahwa toleransi tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau kegiatan seremonial. Kehidupan bersama membutuhkan pengalaman sosial yang nyata. Dialog perlu diterjemahkan menjadi perjumpaan, kerja sama, literasi, keterlibatan masyarakat, dan

ruang sosial yang memungkinkan setiap kelompok tetap mempertahankan identitasnya tanpa meniadakan keberadaan kelompok lain.

Konteks Bandung yang menjadi pijakan empiris dalam buku ini memberikan gambaran menarik tentang kehidupan masyarakat urban yang berada dalam persimpangan antara agama, pendidikan, budaya lokal, globalisasi, dan transformasi digital. Pengalaman tersebut tidak dimaksudkan sebagai gambaran tunggal bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi menjadi salah satu jendela untuk memahami bagaimana keberagaman dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan mengenai kearifan lokal juga memberikan dimensi penting. Nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai modal yang dapat diterjemahkan kembali sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, hubungan antara lokal dan global tidak harus selalu dipahami sebagai pertentangan. Keduanya dapat berinteraksi, saling mengoreksi, dan membentuk cara-cara baru dalam membangun kehidupan bersama.

Pada akhirnya, buku ini membawa pembaca pada satu gagasan mendasar: masyarakat yang majemuk tidak membutuhkan keseragaman, tetapi membutuhkan kemampuan untuk mengelola perbedaan secara bermartabat. Kehidupan bersama dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, pengetahuan, dan kesediaan untuk terus membuka ruang perjumpaan.

Bandung, Juli 2026

Penulis

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ***Merawat Keberagaman di Era Global: Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme*** dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca.

Buku ini berangkat dari sebuah kegelisahan sederhana: **bagaimana masyarakat dapat tetap hidup bersama ketika dunia membuat perbedaan semakin dekat, semakin terlihat, dan sekaligus semakin mudah dipertentangkan?**

Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Gagasan, nilai, identitas, dan pengetahuan keagamaan bergerak melampaui batas geografis. Media digital membuat seseorang dapat memperoleh pengetahuan agama dari berbagai sumber dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa fragmentasi otoritas, polarisasi identitas, segregasi informasi, serta semakin kompleksnya relasi antarwarga di ruang publik.

Dalam situasi seperti itu, keberagaman tidak cukup hanya diakui sebagai kenyataan. Ia perlu dipahami, dikelola, dan dirawat.

Buku ini lahir dari proses akademik yang pada awalnya bertumpu pada kajian mengenai jaringan intelektual keagamaan dan multikulturalisme dalam konteks masyarakat urban Bandung. Namun dalam penyusunannya sebagai buku, pembahasan dikembangkan menjadi refleksi yang lebih luas mengenai agama, globalisasi, perubahan otoritas, jaringan sosial, media digital, toleransi, resistensi, kearifan lokal, serta usaha membangun kehidupan bersama.

Bandung tetap menjadi konteks empiris penting dalam buku ini. Kehidupan perguruan tinggi, pesantren, komunitas keagamaan, organisasi sosial, ruang budaya, dan masyarakat urban menyediakan pengalaman yang kaya untuk memahami bagaimana gagasan tentang keberagaman

diproduksi, diperdebatkan, diterima, dan dinegosiasikan. Meskipun demikian, buku ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan pengalaman Bandung sebagai representasi tunggal kehidupan multikultural di Indonesia. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai sebuah konteks yang membantu membaca dinamika sosial yang lebih luas.

Pembahasan buku ini dimulai dari perubahan dunia dan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan keagamaan. Selanjutnya, pembaca diajak melihat siapa yang membentuk otoritas dan pemahaman agama, bagaimana tokoh berkembang menjadi jaringan, bagaimana multikulturalisme melampaui toleransi pasif, serta bagaimana ruang publik dan media digital menjadi arena produksi sekaligus perebutan makna.

Buku ini kemudian bergerak menuju persoalan yang lebih kompleks: resistensi terhadap keberagaman, peran kearifan lokal, serta kemungkinan jaringan intelektual menjadi perekat sosial. Pada bagian akhir, seluruh pembahasan diarahkan pada gagasan bahwa keberagaman perlu bergerak dari wacana menuju ekosistem—sebuah kehidupan sosial yang ditopang oleh pendidikan, agama, komunitas, media, budaya lokal, literasi, dan keterlibatan warga secara berkelanjutan.

Kami sengaja tidak menempatkan multikulturalisme sebagai sebuah keadaan ideal tanpa persoalan. Kehidupan masyarakat selalu mengandung negosiasi, batas, ketegangan, dan perbedaan kepentingan. Karena itu, ukuran kehidupan bersama bukanlah hilangnya konflik atau perbedaan, melainkan kemampuan untuk mempertahankan komunikasi, penghormatan, dan kerja sama ketika perbedaan tersebut tetap ada.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kompleksitas hubungan agama, globalisasi, media digital, dan multikulturalisme tidak mungkin selesai dibahas dalam satu buku. Namun kami berharap gagasan yang disajikan dapat menjadi titik awal bagi

percakapan yang lebih luas, penelitian lanjutan, serta pengembangan praktik sosial yang lebih reflektif dan inklusif.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, pemikiran, dan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para akademisi, tokoh agama, komunitas, institusi pendidikan, serta berbagai pihak yang selama ini terus membuka ruang dialog dan perjumpaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Akhirnya, buku ini tidak menawarkan ajakan untuk menjadi sama. Yang ingin disampaikan justru sebaliknya: **perbedaan dapat tetap dipertahankan tanpa harus menghilangkan kemampuan untuk hidup bersama**.

Semoga buku ini memberi manfaat, memperluas percakapan, dan menjadi bagian kecil dari ikhtiar panjang dalam merawat keberagaman di tengah dunia yang terus berubah.

Bandung, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **V**

PRAKATA ..... **VII**

DAFTAR ISI ..... **X**

BAB 1 KEBERAGAMAN DI TENGAH DUNIA YANG BERUBAH **13**

A. Globalisasi dan Perubahan Cara Beragama 14
B. Ketika Yang Global Bertemu dengan Yang Lokal 15
C. Keberagaman, Identitas, dan Kehidupan Bersama 16
D. Ruang Publik dan Dunia Digital 18
E. Jaringan Intelektual dalam Ruang Urban 19
F. Merawat, Bukan Menyeragamkan 20

BAB 2 KETIKA AGAMA MASUK KE DALAM ARUS GLOBAL **22**

A. Agama Tidak Menghilang, tetapi Bertransformasi 22
B. Dunia yang Semakin Dekat 24
C. Arus Global dan Negosiasi Lokal 25
D. Agama dalam Ruang Digital 26
E. Identitas, Kepastian, dan Respons terhadap Perubahan 27
F. Dari Adaptasi menuju Tanggung Jawab Publik 28

BAB 3 SIAPA YANG MEMBENTUK CARA KITA MEMAHAMI AGAMA? **31**

A. Otoritas Tidak Pernah Berdiri Sendiri 32
B. Dari Penjaga Tradisi menuju Produsen Wacana 33
C. Ketika Otoritas Diperdebatkan 34
D. Pengetahuan, Jaringan, dan Legitimasi 35
E. Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Media Digital 35
F. Intelektual dan Tanggung Jawab Publik 37

BAB 4 DARI TOKOH MENUJU JARINGAN **39**

A. Jaringan Tidak Selalu Formal 39
B. Kampus, Pesantren, dan Komunitas 40

C. Dari Relasi Seremonial menuju Kolaborasi 42
D. Jaringan sebagai Ruang Produksi Pengetahuan 42
E. Media Digital dan Perluasan Jaringan 43
F. Dari Jaringan menuju Ekosistem Sosial 44

BAB 5 47

MULTIKULTURALISME LEBIH DARI SEKADAR TOLERANSI 47

A. Dari Keberagaman menuju Pengakuan 47
B. Toleransi Pasif dan Toleransi Aktif 48
C. Dialog tanpa Menghapus Identitas 49
D. Multikulturalisme sebagai Praktik Sosial 50
E. Ruang Publik, Batas, dan Kritik 51
F. Dari Toleransi menuju Kemampuan Hidup Bersama 52

BAB 6 54

RUANG PUBLIK, MEDIA DIGITAL, DAN PEREBUTAN MAKNA 54

A. Ketika Ruang Publik Berpindah ke Layar 54
B. Produsen Makna dan Otoritas Baru 55
C. Algoritma, Ruang Gema, dan Polarisasi 56
D. Agama dalam Budaya Digital 57
E. Media Digital sebagai Ruang Dialog 58
F. Literasi Digital dan Perebutan Makna 59

BAB 7 KETIKA KEBERAGAMAN MENGHADAPI RESISTENSI 61

A. Ketika Perubahan Menimbulkan Rasa Tidak Pasti 62
B. Dari Perbedaan menuju Polarisasi 63
C. Ketika Dialog Dianggap Mengancam Identitas 63
D. Fragmentasi Komunitas dan Ruang Bersama 64
E. Resistensi dan Ekosistem Perjumpaan 66
F. Dari Resistensi menuju Negosiasi 67

BAB 8 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL HIDUP BERSAMA 69

A. Kearifan Lokal Bukan Sekadar Tradisi 69
B. Someah dan Etika Menerima Yang Lain 70

C. HIDUP BERSAMA DALAM PRAKTIK SEHARI-HARI 71
D. GLOKALISASI DAN MODAL SOSIAL 71
E. KEARIFAN LOKAL YANG KRITIS DAN ADAPTIF 73
F. DARI WARISAN MENUJU JEMBATAN SOSIAL 74

BAB 9 JARINGAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEREKAT SOSIAL 75

A. JARINGAN SEBAGAI RUANG PERTEMUAN 75
B. KAMPUS DAN INTELEKTUAL SEBAGAI PENGHUBUNG 76
C. DARI DIALOG MENUJU KERJA BERSAMA 77
D. CIVIC ENGAGEMENT DAN SOLIDARITAS SOSIAL 78
E. MODAL SOSIAL, KEKUASAAN, DAN BATAS JARINGAN 79
F. DARI JARINGAN MENUJU KOHESI SOSIAL 80

BAB 10 MERAWAT KEBERAGAMAN: DARI WACANA MENUJU EKOSISTEM 82

A. DARI WACANA MENUJU PRAKTIK 82
B. KAMPUS, PESANTREN, DAN KOMUNITAS SEBAGAI EKOSISTEM PENGETAHUAN 83
C. MEDIA DIGITAL DAN LITERASI MULTIKULTURAL 84
D. CIVIC ENGAGEMENT DAN KEPEMILIKAN SOSIAL 85
E. DARI PROGRAM MENUJU KEBIASAAN SOSIAL 85
F. EMPAT PILAR EKOSISTEM KEBERAGAMAN 86

EPILOG 88

HIDUP BERSAMA TANPA MENJADI SERAGAM 88

DAFTAR PUSTAKA 92

BAB 1
KEBERAGAMAN DI TENGAH DUNIA YANG BERUBAH

Dunia hari ini bergerak dalam hubungan yang semakin sulit dipisahkan antara yang lokal dan yang global. Gagasan, simbol, keyakinan, gaya hidup, informasi, dan perdebatan publik melintasi batas wilayah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dahulu berkembang dalam komunitas tertentu kini dapat hadir hampir seketika di ruang sosial yang berbeda melalui media digital, pendidikan, migrasi, jaringan organisasi, dan interaksi lintas budaya. Dalam situasi seperti ini, agama tidak berada di luar arus perubahan. Ia ikut mengalami pergeseran dalam cara dipahami, dipraktikkan, diperdebatkan, dan disampaikan kepada publik.

Globalisasi karena itu tidak cukup dipahami sebagai perluasan perdagangan, teknologi, atau mobilitas ekonomi. Ia juga merupakan proses sosial dan budaya yang memengaruhi cara manusia memandang identitas, otoritas, dan hubungan dengan kelompok lain. Arus informasi yang semakin terbuka mempertemukan masyarakat dengan beragam pandangan keagamaan, ideologi, ekspresi budaya, dan standar nilai. Bagi sebagian orang, keterhubungan tersebut memperluas wawasan dan membuka ruang dialog. Bagi yang lain, perubahan yang cepat dapat menimbulkan rasa tidak aman, kebingungan identitas, atau kebutuhan untuk kembali pada batas-batas yang dianggap lebih pasti.

Di sinilah keberagaman memperoleh makna yang lebih kompleks. Masyarakat majemuk telah hidup dengan perbedaan agama, etnis, budaya, bahasa, dan tradisi jauh sebelum istilah globalisasi menjadi populer. Yang berubah adalah intensitas perjumpaan serta kecepatan sirkulasi gagasan.

Perbedaan yang dahulu dapat berlangsung dalam ruang sosial yang relatif terpisah kini hadir dalam ruang publik yang sama, bahkan dalam layar yang sama.

Perjumpaan tersebut dapat menghasilkan pengayaan, tetapi juga dapat melahirkan ketegangan. Perbedaan mulai menjadi persoalan ketika identitas dipahami sebagai batas mutlak yang membelah manusia menjadi "kami" dan "mereka", ketika ruang dialog menyempit, atau ketika informasi yang dikonsumsi hanya memperkuat prasangka kelompok sendiri. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tidak sekadar berhadapan dengan keberagaman, tetapi juga dengan proses pembentukan jarak sosial.

A. Globalisasi dan Perubahan Cara Beragama

Salah satu perubahan penting pada era global adalah meluasnya akses terhadap pengetahuan keagamaan. Dahulu, otoritas agama banyak bergantung pada kedekatan geografis, lembaga keagamaan, keluarga, atau tokoh yang berada dalam lingkungan sosial tertentu. Hari ini, seseorang dapat mendengarkan ceramah dari negara lain, mengikuti kelas agama lintas wilayah, membaca perdebatan teologis internasional, atau bergabung dengan komunitas digital tanpa pernah bertemu secara fisik dengan orang-orang di dalamnya.

Perubahan ini menciptakan peluang baru. Akses yang luas dapat memperkaya pemahaman, mempertemukan perspektif yang berbeda, dan memperluas ruang pembelajaran. Namun keterbukaan tersebut juga mengubah struktur otoritas. Masyarakat tidak lagi menerima pengetahuan hanya dari lembaga atau figur lokal. Mereka dapat memilih sumber, mengikuti figur yang dianggap meyakinkan, dan membandingkan berbagai tafsir yang sebelumnya tidak selalu tersedia di lingkungan mereka.

Agama karena itu tidak menghilang oleh globalisasi. Ia justru beradaptasi dan memperluas kehadirannya melalui ruang sosial dan digital. Pada saat yang sama, keterbukaan sumber menghadirkan pertanyaan baru: bagaimana membedakan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pendapat yang hanya populer? Masalahnya tidak lagi semata-mata kekurangan informasi, tetapi juga kelebihan informasi tanpa kemampuan yang memadai untuk menilai sumber, konteks, dan konsekuensinya.

Kehidupan beragama di era global semakin memerlukan literasi, refleksi, dan kemampuan dialog. Keyakinan tetap dapat diwariskan, tetapi ia juga perlu dipahami dalam hubungan dengan realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, perubahan cara beragama bukan sekadar perubahan media, melainkan juga perubahan dalam cara otoritas, pengetahuan, dan identitas dibentuk.

B. Ketika Yang Global Bertemu dengan Yang Lokal

Globalisasi sering dibayangkan sebagai kekuatan yang bergerak dari luar menuju masyarakat lokal. Padahal hubungan tersebut tidak berlangsung satu arah. Masyarakat lokal tidak hanya menerima, tetapi juga menafsirkan, memilih, menolak, menyesuaikan, dan mengubah gagasan yang datang dari luar. Proses ini sering disebut glokalisasi, yaitu perjumpaan antara arus global dan konteks lokal yang menghasilkan bentuk-bentuk baru.

Gagasan glokalisasi membantu kita keluar dari dua anggapan yang terlalu sederhana: bahwa globalisasi selalu menghapus identitas lokal, atau sebaliknya bahwa masyarakat lokal dapat mempertahankan identitasnya tanpa perubahan. Kenyataannya jauh lebih dinamis. Identitas lokal dapat bertahan sambil berubah, tradisi dapat menyesuaikan diri, dan nilai global dapat diterima sebagian serta ditolak sebagian. Bahasa lokal pun dapat digunakan untuk menjelaskan

gagasan universal, sementara gagasan dari luar dapat memperoleh makna baru ketika masuk ke dalam konteks sosial yang berbeda.

Dalam masyarakat keagamaan, proses tersebut tampak jelas. Nilai-nilai mengenai hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, demokrasi, dan kebebasan tidak selalu diterima sebagai konsep abstrak. Ia perlu diterjemahkan ke dalam bahasa moral, budaya, dan keagamaan yang dapat dipahami masyarakat. Di sinilah intelektual memiliki peran penting, bukan hanya sebagai penyampai gagasan, tetapi sebagai penerjemah antara dunia gagasan dan realitas sosial.

Peran penerjemahan ini tidak identik dengan menerima setiap gagasan global secara tanpa kritik. Ia justru menuntut kemampuan untuk menilai, menyesuaikan, dan menghubungkan gagasan dengan pengalaman lokal. Dengan cara itu, lokalitas tidak menjadi benteng yang tertutup, dan globalisasi tidak berubah menjadi arus yang menghapus perbedaan.

C. Keberagaman, Identitas, dan Kehidupan Bersama

Masyarakat yang beragam belum tentu menjadi masyarakat multikultural dalam arti substantif. Keberagaman hanya menjelaskan fakta bahwa terdapat kelompok yang berbeda. Hidup bersama membutuhkan lebih dari itu: pengakuan, ruang dialog, kesediaan memahami, aturan yang adil, serta kebiasaan sosial yang memungkinkan orang berbeda tetap berbagi ruang kehidupan.

Karena itu, toleransi tidak dapat berhenti pada sikap “membiarkan yang lain ada”. Toleransi yang hanya bersifat pasif memang dapat mencegah konflik terbuka, tetapi belum tentu membangun hubungan sosial yang sehat. Multikulturalisme mengajukan pertanyaan yang lebih jauh: apakah kelompok yang berbeda memiliki ruang untuk didengar, apakah identitas mereka

diakui, apakah mereka memperoleh kesempatan yang setara, dan apakah kehidupan bersama memungkinkan perjumpaan yang bermakna.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat urban menghadapi tekanan dari media sosial, polarisasi identitas, dan kecenderungan membangun komunitas berdasarkan kesamaan pandangan. Dalam situasi seperti itu, keberagaman bukan hanya persoalan jumlah kelompok, tetapi terutama kualitas hubungan di antara mereka.

Identitas sendiri tidak harus dipandang sebagai masalah. Manusia membutuhkan rasa memiliki, sejarah, nilai, bahasa, dan komunitas yang membantunya memahami siapa dirinya. Masalah muncul ketika identitas berubah fungsi: dari akar yang memberi pijakan menjadi tembok yang memisahkan. Dalam situasi tertentu, identitas yang merasa terancam dapat diperkuat melalui pembentukan batas yang semakin tegas antara kelompok sendiri dan kelompok lain.

Karena itu, pendidikan dan jaringan intelektual memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat membangun identitas yang reflektif: identitas yang memahami tradisi tanpa alergi terhadap perubahan, mempunyai keyakinan tanpa kehilangan kemampuan berdialog, dan memiliki akar tanpa menjadikan akar tersebut sebagai alasan untuk menutup diri.

Persoalan intoleransi juga tidak cukup dipahami hanya sebagai kekurangan moral. Empati, wawasan luas, kemampuan reflektif, dan otonomi berpikir ikut menentukan bagaimana seseorang merespons perbedaan. Orang dapat mengetahui nilai toleransi tanpa benar-benar mampu memahami orang yang berbeda. Pendidikan multikultural karena itu bukan hanya pendidikan tentang nilai, tetapi juga pendidikan tentang cara berpikir.

D. Ruang Publik dan Dunia Digital

Salah satu perubahan terbesar dalam kehidupan masyarakat kontemporer adalah meluasnya ruang publik digital. Dahulu, perdebatan tentang agama, budaya, dan identitas banyak berlangsung di ruang fisik seperti kampus, rumah ibadah, forum organisasi, media cetak, atau pertemuan komunitas. Hari ini, sebagian besar perdebatan tersebut juga berlangsung di media sosial dan berbagai platform digital.

Ruang digital memperluas partisipasi dan memberi kesempatan kepada suara yang sebelumnya tidak terdengar untuk memperoleh perhatian. Namun keterbukaan yang sama juga menghadirkan persoalan baru. Narasi yang emosional dapat bergerak lebih cepat daripada penjelasan yang mendalam, potongan informasi dapat kehilangan konteks, algoritma dapat mempertemukan seseorang terus-menerus dengan pandangan yang mirip dengan miliknya, dan identitas dapat digunakan sebagai instrumen mobilisasi.

Di ruang inilah narasi inklusif dan eksklusif saling berhadapan. Generasi muda berada tepat di tengah situasi tersebut. Sebagian menjadi lebih terbuka karena terbiasa dengan keberagaman global, sementara sebagian lain justru tertarik pada bentuk identitas yang lebih kaku karena menawarkan kepastian di tengah dunia yang berubah cepat.

Situasi ini memperlihatkan salah satu paradoks dunia global: semakin mudah manusia terhubung, semakin besar pula kemungkinan mereka hidup dalam ruang informasi yang terpisah. Karena itu, ruang digital tidak cukup dipahami hanya sebagai medium komunikasi. Ia juga merupakan arena pembentukan identitas, otoritas, solidaritas, dan konflik makna.

E. Jaringan Intelektual dalam Ruang Urban

Ruang urban menyediakan konteks penting untuk melihat bagaimana globalisasi, agama, budaya lokal, dan keberagaman bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Kota-kota pendidikan yang dihuni oleh perguruan tinggi, komunitas keagamaan, organisasi masyarakat, komunitas kreatif, serta kelompok sosial yang beragam menjadi ruang perjumpaan berbagai gagasan dan identitas. Dalam konteks buku ini, pengalaman Bandung memberikan gambaran konkret mengenai dinamika tersebut.

Multikulturalisme di ruang urban tidak berlangsung dalam ruang abstrak. Ia hadir di lingkungan pendidikan, rumah ibadah, komunitas, ruang digital, ruang publik, serta berbagai perjumpaan sehari-hari. Karena itu, pengalaman lokal memiliki nilai penting untuk memahami persoalan yang lebih luas. Bandung tidak perlu diperlakukan sebagai model ideal, tetapi sebagai salah satu ruang empiris untuk melihat bagaimana keterbukaan, identitas, agama, budaya lokal, globalisasi, dan jaringan intelektual saling berinteraksi.

Di dalam ruang semacam itu, gagasan tidak bergerak dengan sendirinya. Ia dibawa oleh manusia, diperkuat oleh lembaga, diperdebatkan dalam forum, diterjemahkan melalui bahasa, diterbitkan, diajarkan, dan disebarkan melalui ruang digital. Karena itu, untuk memahami bagaimana gagasan tentang multikulturalisme berkembang atau mengalami resistensi, kita perlu melihat jaringan yang memungkinkan gagasan tersebut bergerak.

Para akademisi, tokoh agama, pendidik, pengelola lembaga, dan komunitas lintas iman membentuk hubungan yang tidak selalu formal, tetapi penting dalam produksi dan penyebaran wacana keberagaman. Pembicaraan mengenai multikulturalisme karena itu tidak cukup diarahkan pada pertanyaan apakah masyarakat toleran.

Kita juga perlu melihat siapa yang memproduksi gagasan tentang keberagaman, melalui jaringan apa gagasan tersebut bergerak, siapa yang memperoleh kepercayaan publik, bagaimana agama diterjemahkan ke dalam bahasa sosial, dan faktor apa yang membuat dialog dapat bertahan.

Pembacaan semacam ini membawa pembahasan dari persoalan nilai menuju persoalan jaringan. Intelektual tidak hanya dipahami sebagai individu berpengetahuan, tetapi sebagai aktor yang bekerja melalui hubungan sosial, institusi, dan ruang publik.

F. Merawat, Bukan Menyeragamkan

Kata merawat digunakan secara sengaja dalam judul buku ini. Merawat berbeda dengan mengendalikan, dan juga berbeda dengan menyeragamkan. Keberagaman tidak perlu dihapus agar masyarakat dapat hidup bersama. Perbedaan agama, pandangan, budaya, dan identitas tidak harus diselesaikan dengan menjadikan semua orang sama.

Yang diperlukan adalah kondisi sosial yang memungkinkan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Kondisi tersebut membutuhkan dialog, aturan yang adil, pendidikan, ruang perjumpaan, dan kebiasaan sosial yang memberi tempat bagi penghormatan terhadap perbedaan. Tidak satu pun unsur tersebut cukup jika berdiri sendiri.

Karena itu, keberagaman lebih tepat dipahami sebagai sebuah ekosistem. Ia ditopang oleh institusi, bahasa, kebiasaan, ruang publik, pendidikan, jaringan, dan cara masyarakat memperlakukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika salah satu unsur melemah, kualitas hubungan sosial juga dapat ikut terpengaruh.

Buku ini akan mengikuti unsur-unsur tersebut secara bertahap. Pembahasan akan bergerak dari perubahan agama dalam arus global, pergeseran otoritas, pembentukan jaringan intelektual, perdebatan multikulturalisme, dinamika ruang digital, hingga peran jaringan sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar buku ini bukan apakah perbedaan dapat dihilangkan. Justru sebaliknya: bagaimana manusia dapat tetap berbeda tanpa kehilangan kemampuan untuk hidup bersama? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke bab berikutnya, ketika agama masuk semakin jauh ke dalam arus global.

"Merawat keberagaman bukan usaha menjadikan semua orang sama, melainkan membangun kondisi agar perbedaan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk hidup bersama."

BAB 2
KETIKA AGAMA MASUK KE DALAM ARUS GLOBAL

Globalisasi telah mengubah cara manusia bergerak, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan membangun relasi. Namun perubahan tersebut tidak berhenti pada bidang ekonomi atau teknologi. Ia masuk hingga ke wilayah yang lebih dalam: cara manusia memahami identitas, tradisi, keyakinan, dan hubungan dengan kelompok lain.

Agama menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan paling nyata. Doktrin, simbol, praktik, dan wacana keagamaan kini bergerak melalui jaringan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Ceramah dapat diakses lintas negara, fatwa beredar melalui media sosial, komunitas terbentuk tanpa perjumpaan fisik, dan gagasan keagamaan dari satu wilayah dapat segera hadir di tempat lain. Agama dengan demikian tidak lagi hanya hidup dalam ruang lokal, tetapi ikut berada dalam arus pertukaran global yang terus bergerak.

Perubahan tersebut melahirkan dua kecenderungan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, globalisasi membuka kemungkinan dialog, pertukaran pengetahuan, dan perluasan wawasan. Di sisi lain, keterhubungan yang sama dapat memunculkan konflik identitas, kebingungan otoritas, serta hadirnya narasi keagamaan yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal. Pertanyaan pentingnya karena itu bukan apakah agama akan bertahan di tengah globalisasi, melainkan bagaimana agama berubah ketika masuk ke dalam arus global.

A. Agama Tidak Menghilang, tetapi Bertransformasi

Dalam banyak pemikiran modern pernah muncul anggapan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan modernisasi

akan semakin mengecilkan peran agama dalam kehidupan publik. Kenyataan sosial menunjukkan arah yang lebih kompleks. Agama tidak hilang di tengah modernitas; ia justru berubah dalam cara hadir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan ruang publik.

José Casanova menggunakan istilah deprivatisasi agama untuk menjelaskan bagaimana agama kembali hadir dalam ruang publik. Agama tidak hanya berurusan dengan ibadah atau kehidupan privat, tetapi juga terlibat dalam percakapan mengenai moralitas, keadilan sosial, identitas, hak asasi manusia, dan kehidupan bersama. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan antara modernitas dan agama tidak selalu bersifat saling meniadakan. Dalam banyak masyarakat, agama menyesuaikan diri dengan perubahan sosial sambil tetap mempertahankan fungsi simbolik dan moralnya.

Di ruang publik modern, agama hadir melalui lembaga pendidikan, organisasi sosial, media massa, platform digital, kegiatan kemanusiaan, advokasi sosial, dan diskusi publik. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran agama tidak lagi hanya ditentukan oleh institusi tradisional. Keadaan ini membuka peluang baru, sekaligus memperluas medan perdebatan.

Ketika agama memasuki ruang publik, ia tidak lagi hanya berbicara kepada komunitas internal. Ia bertemu dengan kelompok lain, dengan hukum, masyarakat sipil, media, serta nilai-nilai yang mungkin tidak sepenuhnya sama dengan tradisi internalnya. Karena itu, kehadiran agama di ruang publik menuntut kemampuan untuk menerjemahkan keyakinan ke dalam bahasa yang dapat dipahami bersama.

Jürgen Habermas menekankan pentingnya proses penerjemahan tersebut. Dalam masyarakat plural, argumen keagamaan tetap memiliki tempat dalam ruang publik, tetapi perlu hadir dalam bentuk yang memungkinkan dialog dengan warga yang

memiliki latar belakang berbeda. Tantangannya bukan menghilangkan bahasa agama, melainkan membangun jembatan antara keyakinan internal dan kepentingan publik.

B. Dunia yang Semakin Dekat

Salah satu ciri penting globalisasi adalah mengecilnya jarak sosial. Anthony Giddens menjelaskan bahwa modernitas membuat hubungan sosial tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kedekatan ruang dan waktu. Teknologi komunikasi memungkinkan seseorang berhubungan dengan gagasan, komunitas, dan figur yang berada jauh dari lingkungan fisiknya.

Dalam kehidupan beragama, perubahan ini sangat terasa. Seseorang tidak lagi hanya belajar dari guru, keluarga, atau lembaga yang berada di sekitarnya. Ia dapat mengikuti ceramah dari negara lain, membaca karya pemikir dari tradisi yang berbeda, mendengarkan pendakwah dari kota lain, atau menjadi bagian dari komunitas virtual yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah.

Pilihan yang luas tersebut memperkaya akses terhadap pengetahuan, tetapi tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Semakin banyak sumber yang tersedia, semakin penting kemampuan untuk menilai sumber tersebut. Masyarakat perlu membedakan antara pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, opini personal, propaganda, dan konten yang sekadar dirancang untuk menarik perhatian.

Globalisasi pengetahuan agama karena itu juga membawa persoalan literasi. Otoritas tidak lagi hanya ditentukan oleh gelar, lembaga, atau kedudukan formal. Popularitas digital, kemampuan komunikasi, visual, dan kedekatan emosional dengan audiens juga dapat menghasilkan otoritas baru. Seseorang dapat memiliki pengaruh

besar tanpa berada dalam struktur kelembagaan formal, sementara tokoh yang memiliki otoritas tradisional dapat kehilangan jangkauan jika tidak mampu berkomunikasi dalam ruang media baru.

Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian teknologi. Ia menyentuh struktur kekuasaan pengetahuan: siapa yang dipercaya, siapa yang didengar, dan melalui saluran apa suatu tafsir memperoleh legitimasi.

C. Arus Global dan Negosiasi Lokal

Globalisasi sering dibayangkan sebagai proses homogenisasi: dunia menjadi semakin sama, budaya lokal melemah, dan nilai global menggantikan tradisi. Namun realitas sosial tidak sesederhana itu. Arjun Appadurai menunjukkan bahwa arus global bergerak melalui berbagai jalur - media, manusia, teknologi, ide, dan ekonomi - yang saling bersilangan. Akibatnya, globalisasi tidak menghasilkan satu bentuk budaya tunggal. Gagasan yang sama dapat memperoleh respons berbeda ketika masuk ke dalam konteks sosial yang berbeda.

Roland Robertson menjelaskan proses tersebut melalui konsep glokalisasi. Global dan lokal tidak selalu berlawanan; keduanya dapat saling membentuk. Nilai global dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, sementara tradisi lokal dapat menggunakan medium global untuk memperluas jangkauannya.

Dalam kehidupan beragama, proses ini tampak jelas. Gagasan mengenai toleransi, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan dialog antaragama tidak selalu diterima begitu saja. Ia mengalami proses penafsiran melalui tradisi agama, budaya lokal, pendidikan, dan pengalaman sejarah masyarakat. Sebaliknya, nilai lokal juga dapat bergerak ke ruang yang lebih luas melalui media digital.

Tradisi, simbol, cara berpakaian, bahasa dakwah, dan praktik komunitas yang sebelumnya bersifat lokal dapat memperoleh audiens

nasional bahkan internasional. Karena itu, hubungan antara agama dan globalisasi sebaiknya tidak dipahami sebagai hubungan sederhana antara 'yang asli' dan 'yang asing'. Yang berlangsung adalah proses negosiasi, ketika masyarakat terus menentukan apa yang ingin dipertahankan, apa yang ingin diubah, dan bagaimana nilai baru diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Negosiasi ini juga menunjukkan bahwa lokalitas bukan ruang yang pasif. Ia memiliki kemampuan untuk memilih, menyaring, dan memberi makna baru pada arus yang datang dari luar. Pada saat yang sama, keterbukaan terhadap dunia menuntut kemampuan kritis agar proses adaptasi tidak berubah menjadi penerimaan tanpa pertimbangan.

D. Agama dalam Ruang Digital

Globalisasi menjadi semakin intens ketika bertemu dengan digitalisasi. Media sosial, platform video, podcast, forum daring, dan aplikasi percakapan telah mengubah cara pengetahuan agama diproduksi dan diedarkan. Ruang digital memungkinkan masyarakat mengakses ceramah, fatwa, perdebatan, dan identitas keagamaan lintas negara tanpa melalui filter institusi lokal.

Dalam konteks masyarakat urban, kondisi tersebut melahirkan bentuk keberagamaan yang menggabungkan tradisi lokal, budaya populer, dan ekspresi religius digital. Pengajian kreatif, dakwah visual, podcast keagamaan, komunitas hijrah, dan diskusi daring memperlihatkan bagaimana agama beradaptasi dengan budaya media.

Perubahan ini membawa peluang yang besar. Pengetahuan menjadi lebih mudah diakses, kelompok muda memperoleh ruang ekspresi, komunitas dapat terbentuk dengan cepat, dan isu sosial dapat dibicarakan dengan jangkauan yang lebih luas. Bagi kelompok yang

sebelumnya sulit memperoleh akses terhadap sumber pembelajaran, ruang digital bahkan dapat memperluas kesempatan untuk berpartisipasi.

Namun ruang digital juga membawa risiko. Informasi dapat bergerak lebih cepat daripada proses verifikasi, popularitas dapat dianggap sebagai legitimasi, dan konten yang emosional sering lebih mudah memperoleh perhatian daripada penjelasan yang kompleks. Selain itu, seseorang dapat terus-menerus berinteraksi dengan pandangan yang serupa dengan keyakinannya sendiri sehingga semakin jarang berhadapan dengan perspektif yang berbeda.

Dalam situasi seperti itu, media digital dapat berubah dari ruang pembelajaran menjadi ruang penguatan identitas kelompok. Transformasi digital karena itu bukan hanya persoalan efisiensi komunikasi. Ia mengubah cara agama dilihat, dirasakan, diperdebatkan, dan memperoleh otoritas di ruang publik.

E. Identitas, Kepastian, dan Respons terhadap Perubahan

Perubahan yang cepat sering menghasilkan ambivalensi. Bagi sebagian orang, globalisasi berarti kebebasan, akses, dan peluang baru. Bagi yang lain, dunia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan perasaan kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, identitas agama dapat berfungsi sebagai sumber orientasi, rasa memiliki, dan kepastian.

Fungsi tersebut tidak dengan sendirinya bermasalah. Agama memang dapat memberikan landasan moral dan ketenangan. Persoalan muncul ketika pencarian kepastian berubah menjadi kebutuhan untuk menutup seluruh ruang perbedaan. Dalam kondisi tertentu, keterbukaan global dapat mendorong dua respons yang berjalan bersamaan: keterbukaan terhadap pluralitas dan penguatan batas identitas.

Sebagian masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan perbedaan, mengenal tradisi lain, dan memiliki horizon sosial yang lebih luas. Sebagian lainnya dapat memperkuat batas identitas karena merasa nilai-nilai yang diyakininya berada dalam ancaman. Pengalaman masyarakat urban memperlihatkan bahwa kedua kecenderungan tersebut dapat muncul pada saat yang sama, termasuk di kalangan generasi muda.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterhubungan global tidak otomatis menghasilkan sikap inklusif. Keterbukaan informasi juga tidak selalu menghasilkan keterbukaan pikiran. Karena itu, tantangan utama bukan hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kemampuan refleksi, literasi, dan kesediaan untuk berhadapan dengan perspektif yang berbeda.

F. Dari Adaptasi menuju Tanggung Jawab Publik

Di tengah perubahan tersebut, intelektual keagamaan memperoleh posisi yang semakin penting. Mereka tidak sekadar menyampaikan ajaran, tetapi juga menerjemahkan gagasan global ke dalam konteks lokal dan membantu masyarakat memahami isu seperti pluralisme, toleransi, hak asasi manusia, kebebasan, dan identitas melalui bahasa yang memiliki kedekatan dengan pengalaman sosial dan keagamaan masyarakat.

Peran semacam ini tidak sederhana. Gagasan global dapat dianggap sebagai ancaman, tradisi lokal dapat diperlakukan terlalu romantis, dan nilai agama dapat digunakan sebagai sumber dialog maupun sebagai dasar untuk memperkuat batas kelompok. Intelektual karena itu bekerja di wilayah yang menuntut keseimbangan: menjaga hubungan dengan tradisi sekaligus membaca perubahan, berbicara

kepada komunitas internal tanpa kehilangan kemampuan berdialog dengan publik yang lebih luas.

Dalam konteks urban, proses tersebut berlangsung melalui kampus, pesantren, komunitas, forum diskusi, organisasi sosial, media, serta platform digital. Di ruang-ruang inilah gagasan dirumuskan, diuji, diperdebatkan, dan disebarkan. Globalisasi mendorong aktor keagamaan menyesuaikan pendekatan dakwah, produksi wacana, dan strategi komunikasi mereka dalam merespons perubahan sosial.

Peran tersebut menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya menghasilkan arus gagasan, tetapi juga kebutuhan akan penerjemah sosial. Agama yang masuk ke dalam arus global akhirnya menghadapi pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar bagaimana mempertahankan identitas. Ia juga berhadapan dengan tanggung jawab publik: bagaimana nilai agama berkontribusi pada kemanusiaan, keberagaman, keadilan, dan kehidupan bersama.

Dalam masyarakat multikultural, agama memperoleh relevansi publik ketika nilai-nilainya mampu berkontribusi pada kehidupan bersama tanpa menuntut hilangnya identitas kelompok lain. Tantangan besar di era global karena itu bukan memilih antara agama dan modernitas, melainkan bagaimana agama dapat tetap memiliki akar sekaligus mampu hidup di dalam dunia yang penuh perjumpaan.

Globalisasi dan digitalisasi memperluas visibilitas agama dalam berbagai ruang sosial. Namun keterlihatan tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Ia membutuhkan pengetahuan, kemampuan membaca konteks, dan jaringan yang mampu menerjemahkan nilai menjadi tanggung jawab sosial.

Jika agama tidak lagi hidup dalam ruang yang tertutup dan otoritas semakin tersebar, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting: siapa yang membentuk cara masyarakat memahami agama di tengah dunia yang semakin terhubung? Pertanyaan tersebut

menjadi pintu masuk menuju pembahasan tentang intelektual keagamaan dan perubahan otoritas pada bab berikutnya.

"Globalisasi tidak menghapus agama; ia mengubah cara agama bergerak, dibaca, diperdebatkan, dan hadir dalam kehidupan bersama."

BAB 3
SIAPA YANG MEMBENTUK CARA KITA MEMAHAMI AGAMA?

Di tengah dunia yang semakin terhubung, persoalan agama tidak lagi hanya berkaitan dengan apa yang diyakini, tetapi juga dengan siapa yang dipercaya untuk menjelaskan keyakinan tersebut. Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika sumber pengetahuan agama bertambah, media semakin terbuka, dan otoritas tidak lagi terkonsentrasi pada satu lembaga atau figur tertentu.

Dahulu, masyarakat banyak memperoleh pengetahuan agama melalui jalur yang relatif jelas: keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, pesantren, gereja, organisasi keagamaan, atau komunitas lokal. Hubungan antara sumber pengetahuan dan penerima pengetahuan berlangsung melalui struktur sosial yang cukup stabil. Hari ini, situasinya jauh lebih cair. Akademisi, pendakwah, aktivis, penulis, figur media sosial, pemimpin komunitas, hingga kreator digital dapat ikut membentuk pemahaman publik tentang agama, identitas, dan kehidupan bersama.

Perubahan tersebut tidak berarti bahwa otoritas tradisional menghilang. Yang terjadi adalah perluasan arena otoritas. Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan mengenai siapa yang ingin mereka dengarkan, baca, ikuti, atau percaya. Otoritas tidak hanya diwariskan, tetapi juga diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan dalam ruang publik. Karena itu, pembahasan mengenai agama di era global perlu memperhatikan bagaimana otoritas terbentuk, bagaimana intelektual bekerja, dan mengapa sebagian gagasan memperoleh legitimasi yang lebih luas dibandingkan gagasan lainnya.

A. Otoritas Tidak Pernah Berdiri Sendiri

Otoritas pada dasarnya adalah hubungan sosial. Seseorang memiliki otoritas bukan hanya karena ia berbicara, tetapi karena ada pihak lain yang mengakui, menerima, atau mempercayai ucapannya. Dalam pemikiran klasik Max Weber, otoritas dapat bersumber dari tradisi, kharisma, maupun struktur rasional-legal. Dalam kehidupan keagamaan, bentuk tradisional dan karismatik mudah dikenali melalui figur ulama, pendeta, pemimpin spiritual, atau tokoh agama yang memperoleh kepercayaan karena keilmuan, reputasi moral, posisi sosial, maupun kemampuan personal yang diakui komunitasnya.

Modernitas kemudian mengubah cara otoritas bekerja. Pendidikan tinggi, berkembangnya media, dan meningkatnya literasi masyarakat membuka ruang bagi bentuk otoritas yang lebih berbasis argumentasi dan pengetahuan. Seseorang dapat memperoleh pengaruh karena karya ilmiahnya, kemampuan menjelaskan isu yang kompleks, rekam jejak sosial, atau kapasitasnya menghubungkan ajaran agama dengan persoalan kontemporer.

Dengan demikian, otoritas keagamaan tidak hanya terkait dengan posisi formal. Ia juga berkaitan dengan kemampuan membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat lahir dari kompetensi, integritas, pengalaman, jaringan sosial, kemampuan komunikasi, serta konsistensi antara gagasan dan tindakan. Sebaliknya, otoritas dapat melemah ketika publik menilai bahwa seorang figur tidak lagi relevan, tidak responsif terhadap persoalan baru, atau kehilangan legitimasi moral. Otoritas karena itu bukan sesuatu yang sepenuhnya statis; ia dapat menguat, bergeser, atau berkurang seiring perubahan sosial.

B. Dari Penjaga Tradisi menuju Produsen Wacana

Peran intelektual keagamaan tidak cukup dipahami hanya sebagai penjaga pengetahuan yang sudah ada. Antonio Gramsci memperkenalkan gagasan tentang intelektual organik, yaitu intelektual yang tidak sekadar bekerja di ruang abstrak, tetapi terlibat dalam kehidupan sosial dan ikut membentuk cara suatu kelompok memahami dunia. Dalam konteks agama, gagasan tersebut membantu menjelaskan bahwa intelektual tidak hanya mengulang doktrin, tetapi juga menafsirkan realitas, menyusun bahasa, dan membangun kerangka pemahaman bagi komunitasnya.

Peran ini menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi isu yang tidak dapat dijawab hanya dengan pengulangan formula lama. Globalisasi, media digital, perubahan budaya, keberagaman, hak kelompok minoritas, relasi antaragama, dan perubahan otoritas merupakan persoalan yang menuntut penafsiran terus-menerus. Intelektual keagamaan bekerja sebagai penghubung dengan menerjemahkan ajaran normatif ke dalam bahasa sosial, menghubungkan tradisi dengan persoalan kontemporer, serta memberi istilah bagi pengalaman yang sebelumnya sulit dijelaskan.

Dalam proses tersebut, intelektual ikut membentuk cara masyarakat menilai sesuatu sebagai ancaman, peluang, penyimpangan, atau bentuk adaptasi yang masih dapat diterima. Karena itu, intelektual tidak hanya berurusan dengan pengetahuan, tetapi juga terlibat dalam produksi makna. Wacana yang dihasilkan dapat memperluas ruang dialog, tetapi juga dapat mempersempitnya; dapat membantu masyarakat memahami perbedaan secara lebih reflektif, tetapi juga dapat memperkuat batas identitas yang kaku. Posisi ini membuat kerja intelektual selalu berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

C. Ketika Otoritas Diperdebatkan

Perkembangan media dan pendidikan membuat otoritas keagamaan semakin tersebar. Olivier Roy menunjukkan bahwa globalisasi ikut mengubah hubungan antara institusi tradisional dan penafsiran agama. Dalam masyarakat yang semakin terbuka, publik memiliki lebih banyak pilihan sumber, sementara figur baru dapat muncul di luar struktur keagamaan formal.

Dale F. Eickelman dan James Piscatori menggambarkan situasi ini sebagai contested authority, yaitu otoritas yang terus diperdebatkan dan dinegosiasikan dalam ruang publik. Pendidikan tinggi, literasi agama, dan akses media memungkinkan akademisi, aktivis, serta berbagai aktor lain ikut terlibat dalam penafsiran dan produksi wacana keagamaan. Masyarakat tidak hanya bertanya siapa tokoh agamanya, tetapi juga siapa yang paling mampu menjelaskan persoalan tertentu yang mereka hadapi.

Perubahan tersebut membuat otoritas semakin tersegmentasi. Seseorang mungkin memiliki legitimasi tinggi dalam persoalan ritual, tetapi belum tentu dianggap sebagai rujukan dalam isu sosial. Seorang akademisi dapat dipercaya dalam pembahasan hubungan agama dan masyarakat, tetapi tidak otomatis memiliki otoritas dalam persoalan hukum agama. Demikian pula, figur digital dapat memiliki audiens besar tanpa selalu memiliki otoritas keilmuan yang setara dengan tingkat popularitasnya.

Kondisi ini memberi masyarakat lebih banyak pilihan, tetapi sekaligus menuntut kemampuan yang lebih tinggi dalam menilai sumber. Otoritas tidak lagi dapat dibaca hanya dari gelar, posisi, jumlah pengikut, atau kedekatan emosional. Publik perlu memperhatikan kompetensi, rekam jejak, konteks, dan batas keahlian dari setiap figur yang dijadikan rujukan.

D. Pengetahuan, Jaringan, dan Legitimasi

Otoritas intelektual tidak dibentuk hanya oleh apa yang diketahui seseorang. Ia juga dipengaruhi oleh di mana orang tersebut berada, dengan siapa ia terhubung, dan bagaimana pengetahuannya beredar. Pierre Bourdieu membantu menjelaskan hal ini melalui konsep modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Pendidikan, kemampuan akademik, karya ilmiah, jejaring sosial, reputasi, dan pengakuan publik dapat saling memperkuat sehingga seseorang memperoleh posisi yang lebih berpengaruh dalam ruang sosial.

Dalam konteks keagamaan, seorang intelektual dapat memiliki modal keilmuan yang kuat tetapi pengaruh publik terbatas karena jejaringnya sempit. Sebaliknya, seseorang dengan kemampuan komunikasi yang tinggi dan jaringan luas dapat memiliki pengaruh besar meskipun otoritas keilmuannya terus diperdebatkan. Pengetahuan karena itu tidak otomatis menjadi pengaruh; ia memerlukan saluran yang memungkinkan gagasan bergerak dan memperoleh pengakuan.

Kampus, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas lintas iman, forum diskusi, penerbitan, media, dan platform digital dapat menjadi ruang yang memperluas sirkulasi gagasan. Dalam konteks lokal, otoritas intelektual terbentuk melalui interaksi antara modal keilmuan, jaringan sosial, dan keterlibatan dalam isu publik. Intelektual tidak bekerja dalam ruang hampa; ia berada di dalam jaringan, dan jaringan ikut menentukan seberapa jauh suatu gagasan dapat bergerak.

E. Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Media Digital

Dalam konteks urban, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan formal. Ia juga dapat menjadi ruang perjumpaan antara berbagai tradisi, komunitas, dan gagasan. Kampus

dapat berfungsi sebagai bridging institution, yaitu lembaga yang mempertemukan kelompok berbeda melalui dialog, seminar, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kerja kolaboratif. Akademisi dalam situasi ini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi dapat menjadi knowledge broker yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan publik.

Peran semacam ini penting dalam masyarakat majemuk karena isu keberagaman sering menjadi terlalu sederhana ketika hanya diperdebatkan melalui slogan. Ruang akademik memungkinkan persoalan dibahas dengan argumen, data, sejarah, dan perbandingan. Namun kampus bukan satu-satunya ruang pertemuan. Komunitas lintas iman, pesantren, organisasi sosial, forum warga, ruang budaya, serta media lokal juga dapat menjadi titik tempat jaringan intelektual tumbuh melalui hubungan personal, kolaborasi, dan kepercayaan.

Pengalaman di ruang urban memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dapat berkembang menuju jejaring kolaboratif berbasis pengetahuan, tidak lagi terbatas pada relasi seremonial. Otoritas keagamaan yang relevan bagi masyarakat modern karena itu sering dibentuk melalui kerja lintas ruang: antara lembaga pendidikan, komunitas, organisasi, dan media.

Media digital mempercepat proses tersebut. Figur yang sebelumnya tidak dikenal dapat memperoleh audiens besar melalui video pendek, podcast, siaran langsung, atau unggahan visual tanpa harus melalui struktur organisasi yang panjang. Hal ini membuka ruang demokratisasi pengetahuan karena lebih banyak orang dapat berbicara dan lebih banyak perspektif memperoleh ruang.

Namun visibilitas tinggi di ruang digital tidak selalu berkorelasi dengan kedalaman pengetahuan atau otoritas keilmuan. Popularitas kadang dipersepsikan sebagai tanda kompetensi, meskipun keduanya

tidak selalu berhubungan secara langsung. Kedekatan emosional dengan audiens dan kemampuan menyederhanakan isu juga dapat meningkatkan pengaruh seorang figur. Karena itu, masyarakat membutuhkan literasi yang tidak hanya membaca isi agama, tetapi juga membaca siapa yang berbicara, dari posisi apa, melalui jaringan apa, dan dalam konteks apa suatu pendapat disampaikan.

F. Intelektual dan Tanggung Jawab Publik

Dalam masyarakat multikultural, intelektual keagamaan menghadapi tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan batas internal komunitasnya. Mereka juga berhadapan dengan persoalan kehidupan bersama. Peter Berger dan Thomas Luckmann menunjukkan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi makna, di mana bahasa, institusi, dan interaksi sosial memainkan peran penting. Intelektual keagamaan ikut terlibat dalam proses tersebut ketika mereka menerjemahkan ajaran menjadi wacana publik yang dapat dipahami masyarakat.

Setiap gagasan yang disebarkan ke ruang publik membawa konsekuensi sosial. Bahasa yang digunakan dapat membuka dialog atau menutupnya. Penafsiran tertentu dapat memperkuat penghormatan terhadap perbedaan atau justru memperdalam segregasi. Sikap seorang intelektual terhadap kelompok lain dapat memperluas ruang perjumpaan, tetapi juga dapat menjadi legitimasi bagi penolakan. Karena itu, tanggung jawab intelektual tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan apa yang dianggap benar, tetapi juga dengan mempertimbangkan bagaimana gagasan tersebut dikomunikasikan dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Dalam konteks multikultural, legitimasi publik semakin dipengaruhi oleh kemampuan intelektual untuk tetap berakar pada tradisinya sekaligus mampu berbicara secara dialogis. Otoritas

keagamaan akhirnya terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan, institusi, media, pengalaman, jaringan, dan pengakuan publik. Masyarakat tidak memilih sumber otoritas hanya berdasarkan satu faktor, tetapi melalui kombinasi kompetensi, reputasi, kedekatan, bahasa, pengalaman, dan tingkat kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu.

Karena itu, pembicaraan tentang agama di era global tidak cukup berhenti pada isi ajaran. Kita juga perlu melihat siapa yang memproduksi makna, bagaimana gagasan memperoleh legitimasi, dan melalui jaringan apa pengaruh itu bergerak. Ketika dilihat dari sudut ini, intelektual keagamaan tidak lagi tampak sebagai figur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang terhubung dengan lembaga, komunitas, media, audiens, dan aktor lain.

Jika otoritas selalu bekerja melalui hubungan, maka persoalan berikutnya bukan lagi hanya siapa yang dipercaya, tetapi juga bagaimana para aktor tersebut saling terhubung. Pertanyaan inilah yang membawa kita menuju Bab 4: dari tokoh menuju jaringan.

"Otoritas tidak hanya lahir dari apa yang diketahui seseorang, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan, memperoleh legitimasi, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan bersama."

BAB 4
DARI TOKOH MENUJU JARINGAN

Dalam kehidupan sosial, gagasan hampir tidak pernah bergerak sendirian. Ia membutuhkan orang yang menyampaikan, ruang yang mempertemukan, lembaga yang menopang, serta jaringan yang memungkinkan sebuah ide berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Karena itu, memahami peran intelektual keagamaan tidak cukup hanya dengan melihat siapa tokohnya. Kita juga perlu melihat bagaimana para aktor tersebut saling terhubung.

Perubahan dari tokoh menuju jaringan menjadi semakin penting dalam masyarakat modern. Otoritas keagamaan memang masih dapat berpusat pada figur tertentu, tetapi pengaruh sosial jarang bertumpu pada figur tunggal. Gagasan tumbuh melalui relasi antara akademisi, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas lintas iman, media, dan ruang digital. Dalam konteks urban, jaringan semacam ini membentuk ekosistem produksi pengetahuan yang lebih cair dan terbuka.

Manuel Castells menjelaskan masyarakat modern melalui konsep network society, yaitu masyarakat yang relasi sosialnya semakin dibangun melalui jejaring komunikasi yang melampaui batas institusi dan wilayah. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana kampus, pesantren, komunitas, organisasi sosial, dan media digital dapat saling terhubung dalam proses produksi serta penyebaran wacana. Jaringan, dengan demikian, bukan sekadar kumpulan orang, melainkan struktur hubungan yang memungkinkan pengetahuan bergerak dan pengaruh sosial terbentuk.

A. Jaringan Tidak Selalu Formal

Ketika mendengar kata jaringan, kita sering membayangkan organisasi resmi, struktur kepengurusan, atau lembaga yang memiliki aturan tertulis. Dalam kenyataannya, banyak jaringan intelektual justru

tumbuh melalui hubungan yang tidak selalu formal. Relasi dapat terbentuk dari pertemuan akademik, diskusi, kegiatan sosial, penelitian, pengabdian masyarakat, pertemanan profesional, forum lintas agama, atau kolaborasi antarorganisasi.

Hubungan yang awalnya bersifat personal dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih luas ketika terdapat kesamaan isu, kepercayaan, dan kebutuhan untuk bekerja bersama. Dalam konteks urban, pola semacam ini penting karena banyak persoalan sosial tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Isu keberagaman, pendidikan, kemanusiaan, literasi digital, dan dialog antaragama membutuhkan kerja lintas institusi dan lintas komunitas.

Karena itu, jaringan intelektual tidak cukup dipahami dari struktur formalnya. Yang sama pentingnya adalah kualitas relasi di antara para aktor: tingkat kepercayaan, intensitas komunikasi, pertukaran gagasan, kesediaan bekerja sama, serta kemampuan menjaga hubungan di tengah perbedaan latar belakang. Jaringan yang kuat tidak selalu merupakan jaringan yang paling besar. Dalam banyak situasi, hubungan yang lebih kecil tetapi memiliki tingkat kepercayaan tinggi justru lebih mampu menghasilkan kolaborasi berkelanjutan.

B. Kampus, Pesantren, dan Komunitas

Perguruan tinggi menjadi salah satu ruang penting dalam pembentukan jaringan intelektual keagamaan. Kampus menyediakan lingkungan yang memungkinkan berbagai aktor bertemu dalam forum yang relatif terbuka. Seminar, kuliah umum, diskusi publik, konferensi, penelitian, dan pengabdian masyarakat membuka ruang perjumpaan antara akademisi, mahasiswa, tokoh agama, aktivis, komunitas masyarakat sipil, dan kelompok lain.

Dalam konteks urban, sejumlah perguruan tinggi di Bandung menjadi salah satu contoh ruang tempat isu pluralisme, toleransi, demokrasi, moderasi beragama, hak kelompok minoritas, dan hubungan antaragama dibicarakan secara lebih sistematis. Pengalaman ini penting bukan karena Bandung harus diperlakukan sebagai model tunggal, tetapi karena ia menunjukkan bagaimana institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai ruang perjumpaan antara tradisi keilmuan dan pengalaman sosial.

Kampus dalam situasi seperti itu dapat berfungsi sebagai bridging institution, yakni lembaga yang mempertemukan kelompok berbeda dan menciptakan ruang komunikasi di antara mereka. Akademisi juga dapat berperan sebagai knowledge broker yang menghubungkan hasil penelitian, teori, pengalaman sosial, dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan yang sebelumnya berada di ruang akademik dapat diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih relevan bagi publik, sementara pengalaman masyarakat dapat dibawa kembali ke ruang akademik untuk dipahami secara lebih sistematis.

Namun kampus bukan satu-satunya pusat jaringan. Pesantren, organisasi keagamaan, komunitas lintas iman, organisasi mahasiswa, kelompok budaya, dan forum warga juga membentuk ruang pertukaran gagasan. Pesantren memiliki kekuatan dalam menghubungkan tradisi keagamaan dengan kehidupan masyarakat, organisasi keagamaan memiliki jaringan yang luas, sedangkan komunitas lintas iman sering bergerak lebih fleksibel dalam membangun perjumpaan antaridentitas.

Jaringan semacam ini berkembang melalui kombinasi antara struktur dan hubungan personal. Lembaga menyediakan ruang dan sumber daya, sedangkan kepercayaan membuat hubungan dapat bertahan setelah kegiatan formal selesai. Karena itu, keberlanjutan kolaborasi sering kali bergantung pada kemampuan para aktor menjaga

komunikasi dan mengubah perjumpaan sesaat menjadi relasi jangka panjang.

C. Dari Relasi Seremonial menuju Kolaborasi

Salah satu perubahan penting dalam jaringan intelektual keagamaan adalah pergeseran dari hubungan yang bersifat seremonial menuju kerja sama yang lebih substantif. Hubungan antaragama atau antarorganisasi sering kali dimulai dari undangan resmi, acara peringatan, dialog formal, atau kegiatan simbolik. Pertemuan semacam ini tetap memiliki nilai karena membuka ruang perjumpaan, tetapi dampaknya terbatas jika tidak dilanjutkan dengan kerja bersama.

Kolaborasi menjadi lebih bermakna ketika aktor dari berbagai latar belakang bekerja pada persoalan yang sama, seperti pendidikan, kemanusiaan, literasi digital, kerja sosial, penelitian, pendampingan masyarakat, atau dialog berbasis persoalan nyata. Dalam situasi seperti ini, perbedaan identitas tidak dihapus. Ia tetap dipertahankan, tetapi tidak menjadi penghalang untuk bekerja bersama.

Dalam konteks urban, hubungan antara kampus, komunitas, dan aktor keagamaan dapat berkembang dari kegiatan seremonial menuju jejaring kolaboratif berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi menyediakan ruang pertemuan, sementara akademisi dan aktor komunitas membantu menghubungkan nilai keagamaan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Perubahan ini membuat toleransi menjadi lebih konkret karena tidak hanya dibicarakan dalam forum, tetapi juga diuji melalui praktik sosial.

D. Jaringan sebagai Ruang Produksi Pengetahuan

Jaringan tidak hanya berfungsi mempertemukan orang; ia juga menjadi ruang produksi pengetahuan. Di dalam jaringan, gagasan dapat

diuji, diperdebatkan, disempurnakan, dan diterjemahkan. Akademisi membawa teori dan hasil penelitian, tokoh agama membawa tradisi serta pengalaman komunitas, aktivis membawa pengetahuan lapangan, sementara komunitas menghadirkan pengalaman konkret kehidupan sehari-hari.

Pertemuan berbagai bentuk pengetahuan tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya. Pierre Bourdieu membantu menjelaskan proses ini melalui gagasan tentang field atau arena sosial. Dalam suatu arena, para aktor membawa modal yang berbeda - keilmuan, sosial, budaya, maupun simbolik - dan saling berinteraksi untuk memperoleh legitimasi.

Dalam jaringan intelektual, legitimasi tidak hanya lahir dari gelar akademik. Ia juga dibentuk oleh kontribusi publik, kemampuan membangun relasi, kepercayaan komunitas, konsistensi dalam kerja sosial, dan kapasitas menerjemahkan pengetahuan ke dalam persoalan konkret. Karena itu, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi dapat menjadi arena tempat pengetahuan dan legitimasi diproduksi secara bersama.

Dari sudut ini, modal intelektual dan modal sosial tidak perlu dipahami sebagai dua hal yang terpisah. Pengetahuan membutuhkan jaringan agar dapat bergerak, sementara jaringan membutuhkan pengetahuan agar tidak berhenti sebagai hubungan sosial tanpa arah. Keduanya saling memperkuat ketika terhubung dengan kebutuhan publik.

E. Media Digital dan Perluasan Jaringan

Perkembangan media digital mengubah cara jaringan bekerja. Jika dahulu jaringan sangat bergantung pada pertemuan fisik, hari ini komunikasi dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan, forum daring, podcast, dan platform video. Perubahan tersebut

memperluas jangkauan: gagasan dari sebuah diskusi lokal dapat menyebar secara nasional, forum kecil dapat memperoleh audiens besar, dan kolaborasi dapat terbentuk tanpa semua aktor berada di satu tempat.

Namun jaringan digital juga membawa tantangan. Hubungan menjadi lebih cepat, tetapi belum tentu lebih dalam. Akses semakin luas, tetapi informasi juga semakin terfragmentasi. Jaringan dapat memperluas dialog, tetapi pada saat yang sama dapat memperkuat kelompok yang hanya berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa.

Karena itu, media digital tidak otomatis menghasilkan jaringan yang inklusif. Ia hanya memperbesar kemungkinan hubungan. Kualitas jaringan tetap bergantung pada cara hubungan tersebut dikelola, pada kemampuan para aktor menjaga dialog, serta pada literasi dalam membaca sumber dan kepentingan di balik sebuah narasi.

Dalam konteks keagamaan, media digital menjadi arena baru produksi pengetahuan sekaligus persaingan legitimasi. Gagasan tentang toleransi dan keberagaman dapat beredar lebih luas, tetapi narasi eksklusif juga dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, keterhubungan digital perlu disertai kemampuan untuk menilai bagaimana sebuah hubungan digunakan dan untuk tujuan apa suatu jaringan dibangun.

F. Dari Jaringan menuju Ekosistem Sosial

Jaringan memperoleh makna sosial ketika hubungan yang terbentuk tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk bekerja bersama. Dalam masyarakat plural, jaringan dapat berfungsi sebagai jembatan

antaridentitas. Komunitas yang sebelumnya terpisah dapat bertemu melalui pendidikan, dialog, kerja sosial, atau kegiatan kemanusiaan.

Konsep civic engagement membantu menjelaskan proses tersebut. Keterlibatan warga dalam kegiatan sosial, pendidikan, dialog publik, dan kerja kemanusiaan menciptakan ruang di mana identitas agama tidak menjadi satu-satunya dasar hubungan. Individu dapat bekerja bersama sebagai warga, pendidik, aktivis, atau anggota masyarakat tanpa harus melepaskan identitas keagamaannya.

Namun jaringan tidak boleh diperlakukan secara romantis. Tidak semua jaringan terbuka, setara, atau mampu menjangkau kelompok di luar lingkarannya. Sebuah jaringan dapat menjadi eksklusif ketika hanya mempertemukan orang yang memiliki pandangan serupa, menjadi elitis ketika hanya melibatkan akademisi dan tokoh tertentu, atau terlalu bergantung pada figur tertentu sehingga melemah ketika figur tersebut tidak lagi aktif.

Karena itu, kekuatan jaringan bukan hanya terletak pada jumlah anggota atau besarnya jangkauan. Yang lebih penting adalah keterbukaan, keberlanjutan, distribusi peran, regenerasi, kemampuan menjangkau kelompok berbeda, serta kesediaan melakukan kritik terhadap dirinya sendiri. Tanpa unsur-unsur tersebut, jaringan dapat berubah menjadi lingkaran tertutup yang hanya memperkuat pandangan internal.

Perubahan dari tokoh menuju jaringan pada akhirnya membawa kita pada pemahaman yang lebih luas: pengaruh sosial bekerja melalui ekosistem relasi. Tokoh tetap penting, tetapi ia berada di dalam jaringan; jaringan bekerja melalui lembaga; lembaga berinteraksi dengan komunitas; komunitas berhubungan dengan media; dan media memperluas jangkauan gagasan.

Karena itu, pengaruh sosial tidak cukup dipahami hanya dengan bertanya siapa tokoh yang paling menonjol. Kita juga perlu

melihat siapa yang menghubungkan para aktor, di ruang mana mereka bertemu, melalui media apa gagasan bergerak, dan bagaimana hubungan tersebut menghasilkan tindakan sosial. Jaringan intelektual keagamaan, dari sudut ini, bukan sekadar kumpulan individu berpendidikan, melainkan ekosistem relasi yang menghubungkan pengetahuan, institusi, komunitas, media, dan kehidupan publik.

BAB 5
MULTIKULTURALISME LEBIH DARI SEKADAR TOLERANSI

Masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa benar-benar saling memahami. Kelompok yang berbeda dapat tinggal di kota yang sama, menggunakan ruang publik yang sama, bahkan bekerja dalam institusi yang sama, tetapi tetap berada dalam jarak sosial yang lebar. Karena itu, keberagaman tidak otomatis menghasilkan kehidupan multikultural.

Toleransi merupakan bagian penting dari kehidupan bersama, tetapi toleransi saja belum cukup. Sikap membiarkan kelompok lain hidup sesuai keyakinannya memang dapat mencegah konflik terbuka, namun kehidupan multikultural membutuhkan sesuatu yang lebih jauh: pengakuan, komunikasi, keterlibatan, serta kesediaan membangun ruang bersama tanpa menghapus perbedaan.

Bhikhu Parekh melihat multikulturalisme sebagai proses dialog etis yang terus berlangsung. Setiap kelompok memiliki tradisi, pandangan moral, dan pengalaman sosial yang perlu dipahami melalui perjumpaan, bukan sekadar dinilai dari ukuran kelompok dominan. Dalam kerangka ini, toleransi bukan hanya sikap pasif untuk membiarkan yang lain ada, melainkan keterlibatan aktif dalam memahami dan menghargai kehidupan yang berbeda.

Multikulturalisme dengan demikian tidak hanya berbicara tentang adanya keragaman. Ia berbicara tentang bagaimana keragaman dikelola menjadi kehidupan bersama yang bermartabat.

A. Dari Keberagaman menuju Pengakuan

Keberagaman adalah kenyataan sosial. Manusia hidup dalam perbedaan agama, etnis, bahasa, budaya, kelas sosial, cara hidup, dan

pengalaman sejarah. Namun keberagaman baru memperoleh makna sosial yang lebih dalam ketika muncul pertanyaan tentang bagaimana kelompok-kelompok tersebut diperlakukan.

Di sinilah gagasan pengakuan menjadi penting. Pengakuan tidak berarti bahwa seseorang harus menyetujui seluruh keyakinan atau praktik kelompok lain. Pengakuan berarti menerima bahwa kelompok lain memiliki martabat, hak, identitas, dan ruang untuk hadir dalam kehidupan bersama.

Will Kymlicka membahas multikulturalisme melalui gagasan kewargaan dan hak kelompok dalam masyarakat majemuk. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kesetaraan tidak selalu cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama kepada semua orang. Dalam kondisi tertentu, perbedaan sejarah, identitas, dan posisi sosial juga perlu diperhitungkan agar kelompok yang berbeda dapat berpartisipasi secara wajar dan setara.

Karena itu, multikulturalisme tidak hanya bertanya apakah kelompok yang berbeda diperbolehkan hidup. Ia juga mempertanyakan apakah suara mereka didengar, apakah ruang publik dapat diakses, apakah identitas mereka dihormati, dan apakah mereka memiliki kesempatan yang wajar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

B. Toleransi Pasif dan Toleransi Aktif

Toleransi sering dipahami sebagai kemampuan menahan diri terhadap sesuatu yang berbeda. Pengertian ini penting, tetapi terbatas. Dalam toleransi pasif, seseorang mungkin tidak menyukai keyakinan kelompok lain, tetapi memilih untuk tidak mengganggu. Sikap seperti ini tetap berharga karena mencegah pemaksaan dan kekerasan.

Masyarakat plural, bagaimanapun, membutuhkan bentuk toleransi yang lebih aktif. Toleransi aktif melibatkan komunikasi,

interaksi, dan kesediaan memahami. Ia tidak menuntut seseorang mengubah keyakinannya, tetapi mendorong kemampuan untuk melihat orang lain sebagai sesama warga dan sesama manusia.

Parekh menekankan bahwa toleransi sosial dibangun melalui pendidikan, komunikasi, dan interaksi lintas identitas. Karena itu, dialog antaragama tidak hanya penting sebagai forum resmi, tetapi juga sebagai proses sosial yang memungkinkan kelompok berbeda membangun kepercayaan.

Perbedaannya dapat diringkas secara sederhana. Toleransi pasif berhenti pada sikap, 'silakan hidup dengan keyakinanmu.' Toleransi aktif melangkah lebih jauh dengan bertanya, 'bagaimana kita dapat hidup bersama secara baik meskipun keyakinan kita berbeda?' Pergeseran dari membiarkan menuju membangun hubungan inilah yang penting dalam masyarakat multikultural.

C. Dialog tanpa Menghapus Identitas

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam pembicaraan mengenai multikulturalisme adalah anggapan bahwa dialog akan mengaburkan identitas agama. Kekhawatiran ini perlu dipahami karena bagi komunitas keagamaan, keyakinan bukan sekadar preferensi pribadi. Ia menyangkut kebenaran, tradisi, identitas, dan orientasi hidup.

Namun dialog tidak harus dimaknai sebagai tuntutan untuk menyamakan semua keyakinan. Dialog justru dapat berlangsung ketika setiap pihak memiliki identitas yang jelas, tetapi bersedia mendengarkan dan memahami posisi pihak lain. Penghormatan terhadap perbedaan tidak menuntut seseorang melepaskan keyakinannya, melainkan menuntut kemampuan membangun relasi sosial tanpa meniadakan martabat pihak lain.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan dialogis juga banyak menekankan kerja sama sosial dan kemanusiaan. Dialog tidak cukup berhenti pada perdebatan teologis, tetapi dapat bergerak menuju persoalan nyata seperti pendidikan, kemiskinan, lingkungan, kemanusiaan, dan kehidupan warga.

Dengan demikian, dialog tidak meminta setiap orang menjadi sama. Perbedaan teologis dan identitas tetap ada, tetapi keduanya tidak harus menjadi hambatan bagi kerja sama. Identitas yang kuat dapat tetap terbuka, selama keberadaannya tidak bergantung pada penolakan terhadap kelompok lain.

D. Multikulturalisme sebagai Praktik Sosial

Multikulturalisme akan kehilangan makna jika hanya menjadi slogan. Nilai seperti toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap perbedaan baru memperoleh kekuatan ketika diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari.

Pengalaman komunitas urban menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak hanya dibangun melalui kebijakan atau pidato. Ia membutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, organisasi sosial, komunitas, dan warga dalam interaksi yang berkelanjutan. Kajian tentang Kampung Toleransi di Bandung, misalnya, memperlihatkan pentingnya budaya lokal dan komunikasi lintas identitas dalam membangun kehidupan bersama.

Toleransi karena itu tidak dapat dibangun hanya melalui perintah administratif. Ia membutuhkan pengalaman sosial yang nyata. Orang belajar hidup bersama melalui perjumpaan, kerja sama, penyelesaian persoalan bersama, dan proses membangun kepercayaan dari waktu ke waktu.

Dari sudut ini, multikulturalisme lebih tepat dipahami sebagai praktik sosial daripada sekadar konsep. Ia tumbuh melalui kebiasaan, interaksi, aturan yang adil, dan ruang yang memungkinkan orang berbeda bertemu tanpa harus kehilangan identitasnya.

E. Ruang Publik, Batas, dan Kritik

Masyarakat multikultural selalu berhadapan dengan pertanyaan mengenai batas. Seberapa jauh ekspresi kelompok tertentu dapat hadir di ruang publik? Bagaimana ketika satu kelompok merasa ekspresi kelompok lain bertentangan dengan keyakinannya? Bagaimana posisi kelompok mayoritas dan minoritas ditempatkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban yang selalu sederhana.

Dalam masyarakat urban, ketegangan dapat muncul melalui berbagai isu: penggunaan ruang publik, simbol keagamaan, budaya populer, gaya hidup, perayaan kelompok tertentu, hingga perdebatan mengenai hak kelompok minoritas. Karena itu, multikulturalisme tidak hanya berbicara tentang sikap baik antarindividu. Ia juga berkaitan dengan aturan, institusi, dan distribusi ruang sosial.

Masyarakat membutuhkan mekanisme yang memungkinkan konflik dibicarakan tanpa segera berubah menjadi permusuhan. Di sinilah pentingnya ruang dialog, aturan yang adil, lembaga yang dipercaya, dan budaya publik yang tidak mudah mengubah perbedaan menjadi ancaman.

Multikulturalisme sendiri bukan konsep yang bebas dari kritik. Sebagian kritik menilai bahwa pendekatan multikulturalisme terlalu menekankan pengakuan identitas, sementara ketimpangan sosial, konflik ideologis, atau segregasi tidak selalu mendapat perhatian yang memadai. Dalam ruang digital, tantangan menjadi semakin kompleks

karena identitas dapat mengeras melalui komunitas tertutup dan polarisasi informasi.

Tariq Modood menekankan perlunya multikulturalisme yang dialogis dan kontekstual. Gagasan tentang keberagaman tidak cukup diterapkan secara abstrak; ia perlu memperhatikan sejarah, struktur sosial, agama, dan hubungan antarkelompok dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini penting agar multikulturalisme tidak berubah menjadi slogan moral yang terpisah dari pengalaman sosial.

Keterbatasan juga terlihat ketika program toleransi berhenti pada kegiatan sesaat. Tanpa ruang sosial yang mampu menjaga interaksi setelah kegiatan formal selesai, hubungan lintas kelompok mudah kembali melemah. Karena itu, multikulturalisme membutuhkan institusi, kebiasaan, dan struktur sosial yang menopang hubungan dalam jangka panjang.

F. Dari Toleransi menuju Kemampuan Hidup Bersama

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan multikulturalisme bukan berapa banyak seminar toleransi yang diselenggarakan atau berapa banyak slogan keberagaman yang dipasang di ruang publik. Ukuran yang lebih penting adalah kualitas hubungan sosial: apakah orang yang berbeda dapat berinteraksi tanpa rasa takut, apakah kelompok yang lebih kecil memiliki ruang yang wajar, apakah konflik dapat dibicarakan tanpa kekerasan, apakah institusi memperlakukan kelompok yang berbeda secara adil, dan apakah masyarakat memiliki pengalaman nyata bekerja bersama.

Multikulturalisme karena itu tidak boleh berhenti pada toleransi. Ia bergerak dari toleransi menuju pengakuan, dari pengakuan menuju dialog, dari dialog menuju kerja sama, dan dari kerja sama menuju kemampuan hidup bersama.

Di titik inilah jaringan intelektual yang dibahas pada bab sebelumnya memperoleh makna yang lebih konkret. Jaringan bukan hanya saluran penyebaran gagasan, tetapi juga dapat menjadi ruang tempat masyarakat belajar berjumpa dengan perbedaan. Namun ruang tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan.

Ketika perbedaan bertemu dengan polarisasi, eksklusivisme, identitas yang merasa terancam, dan ruang digital yang terfragmentasi, multikulturalisme menghadapi ujian yang sesungguhnya. Pembahasan inilah yang membawa kita menuju Bab 6 tentang ruang publik, media digital, dan perebutan makna.

"Multikulturalisme bukan usaha menghapus perbedaan, tetapi membangun kemampuan agar perbedaan dapat hidup di dalam ruang bersama tanpa kehilangan martabat masing-masing."

BAB 6
RUANG PUBLIK, MEDIA DIGITAL, DAN PEREBUTAN MAKNA

Ruang publik telah berubah. Dahulu, percakapan mengenai agama banyak berlangsung melalui mimbar, ruang kelas, rumah ibadah, forum organisasi, media cetak, atau pertemuan langsung. Hari ini, sebagian percakapan tersebut juga bergerak melalui layar: media sosial, video pendek, podcast, forum daring, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital yang dapat diakses hampir setiap saat.

Perubahan ini bukan sekadar perubahan medium. Ia juga mengubah siapa yang dapat berbicara, siapa yang dapat didengar, bagaimana pesan disebarkan, dan bagaimana otoritas terbentuk. Ruang digital memungkinkan lebih banyak orang menjadi produsen narasi keagamaan, tidak lagi hanya mereka yang berada di dalam institusi formal.

Karena itu, ruang publik digital bukan sekadar tempat penyebaran informasi. Ia merupakan arena tempat makna diproduksi, diperdebatkan, dipertahankan, dan diperebutkan. Dalam arena inilah agama, identitas, budaya, dan teknologi saling bertemu.

A. Ketika Ruang Publik Berpindah ke Layar

Ruang publik pada dasarnya adalah arena tempat masyarakat membicarakan persoalan bersama. Dalam pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik berkaitan dengan pertukaran gagasan yang memungkinkan warga terlibat dalam diskusi mengenai kepentingan bersama. Dalam perkembangan masyarakat modern, arena tersebut tidak lagi terbatas pada tempat fisik karena media digital memperluas percakapan melampaui batas institusi dan wilayah.

José Casanova juga menunjukkan bahwa agama tidak menghilang dari kehidupan modern. Sebaliknya, agama tetap hadir dalam ruang publik melalui perdebatan tentang moralitas, keadilan sosial, identitas, dan kehidupan bersama. Perkembangan digital mempercepat proses ini dengan memperluas jangkauan pesan dan memperbanyak aktor yang dapat berpartisipasi dalam percakapan publik.

Sebuah ceramah yang sebelumnya hanya didengar oleh puluhan orang dapat memperoleh ribuan penonton. Diskusi kampus dapat dipotong menjadi video pendek, pendapat tokoh agama dapat beredar dalam bentuk kutipan atau potongan video, dan seseorang yang tidak memiliki posisi formal dalam institusi keagamaan dapat membangun audiens besar melalui konsistensi produksi konten. Ruang publik menjadi lebih terbuka, tetapi keterbukaan tersebut tidak selalu membuat kualitas percakapan menjadi lebih baik.

B. Produsen Makna dan Otoritas Baru

Salah satu perubahan paling penting dalam era digital adalah berkurangnya hambatan untuk menjadi pembicara publik. Dahulu, seseorang biasanya membutuhkan institusi, penerbit, media massa, atau jaringan organisasi agar gagasannya dapat menjangkau masyarakat luas. Hari ini, sebuah akun media sosial dapat menjalankan sebagian fungsi tersebut.

Dalam konteks keagamaan, perubahan ini sangat terasa. Instagram, YouTube, TikTok, podcast, dan berbagai platform lain menjadi ruang baru produksi pengetahuan agama. Konten keagamaan tidak lagi hanya diproduksi oleh ulama atau institusi formal, tetapi juga oleh kreator konten, komunitas, aktivis, dan figur digital yang memiliki kemampuan komunikasi kuat.

Perubahan tersebut membuka peluang besar. Pengetahuan menjadi lebih mudah diakses, bahasa keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih dekat dengan generasi muda, dan persoalan seperti kesehatan mental, relasi sosial, keluarga, spiritualitas, serta kehidupan sehari-hari dapat dibicarakan dengan format yang lebih komunikatif.

Pada saat yang sama, media digital bekerja melalui logika perhatian. Konten yang singkat, emosional, mudah dipahami, atau provokatif sering memperoleh respons lebih cepat dibandingkan penjelasan yang panjang dan penuh nuansa. Jumlah pengikut, tayangan, komentar, dan pembagian dapat membentuk persepsi tentang otoritas, meskipun visibilitas tidak selalu sejalan dengan kedalaman pengetahuan.

Masyarakat karena itu menghadapi tantangan baru dalam membedakan keahlian, popularitas, kedekatan emosional, dan kemampuan komunikasi. Pertanyaan penting dalam ruang digital bukan hanya apa isi pesannya, tetapi juga siapa yang berbicara, dari posisi apa, dan dengan dasar pengetahuan apa.

C. Algoritma, Ruang Gema, dan Polarisasi

Media digital tidak hanya menampilkan apa yang diproduksi manusia; banyak platform juga menggunakan sistem rekomendasi yang menyesuaikan konten dengan pola interaksi dan preferensi pengguna. Dari sisi pengalaman pengguna, sistem ini membuat informasi terasa relevan. Namun dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk terus berjumpa dengan pandangan yang serupa dengan pandangannya sendiri.

Fenomena ini sering dibicarakan melalui istilah echo chamber atau ruang gema. Dalam ruang seperti itu, pengguna lebih sering

menerima informasi yang menguatkan keyakinan sebelumnya, sementara pandangan berbeda menjadi semakin jarang ditemui. Situasi ini dapat mempersempit interaksi dengan kelompok lain dan memperkuat segregasi informasi.

Masalahnya bukan sekadar bahwa orang memiliki pandangan berbeda. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Persoalan muncul ketika seseorang hanya berjumpa dengan satu jenis narasi sehingga pandangan lain tidak lagi dipahami sebagai perbedaan yang dapat dibicarakan, tetapi sebagai ancaman yang harus ditolak.

Ruang digital juga ikut membentuk identitas. Orang belajar mengenai dirinya melalui komunitas yang diikuti, konten yang dikonsumsi, figur yang dipercaya, dan bahasa yang digunakan dalam interaksi daring. Proses ini dapat memperkuat identitas secara positif, tetapi juga dapat membuat identitas semakin kaku apabila dibangun terutama melalui oposisi terhadap kelompok lain.

Karena itu, media digital dapat memperluas perjumpaan sekaligus memperkeras batas. Ia dapat membuka dialog, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat memperkuat polarisasi. Dampaknya sangat bergantung pada struktur platform, praktik pengguna, budaya komunikasi, dan konteks sosial tempat interaksi berlangsung.

D. Agama dalam Budaya Digital

Salah satu ciri penting agama di ruang digital adalah perubahan bahasa dan bentuk komunikasi. Pesan keagamaan beradaptasi dengan karakter platform: video pendek mendorong penyampaian yang cepat, podcast membuka ruang percakapan yang lebih panjang, media visual memperkuat simbolisasi, dan platform berbasis video menuntut ritme komunikasi yang mampu mempertahankan perhatian.

Perubahan ini membuat bahasa keagamaan semakin dekat dengan budaya populer. Di satu sisi, agama menjadi lebih mudah dijangkau dan pesan yang sebelumnya terasa formal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa keseharian. Di sisi lain, penyederhanaan dapat menghilangkan konteks dan mengubah persoalan kompleks menjadi slogan yang terlalu ringkas.

Karena itu, transformasi bahasa perlu dipahami sebagai bagian dari negosiasi antara agama dan budaya digital. Agama tidak hanya menggunakan media untuk menyampaikan pesan; karakter media juga ikut membentuk cara pesan agama dirumuskan, dikemas, dan diterima.

Dalam konteks urban yang menjadi pijakan buku ini, video dan podcast keagamaan menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi sebagian generasi muda. Format yang visual, ringkas, dan emosional dinilai lebih mudah diterima dibandingkan bentuk ceramah konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keberagamaan digital berkembang mengikuti logika media sekaligus kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat urban.

E. Media Digital sebagai Ruang Dialog

Walaupun ruang digital sering dikaitkan dengan polarisasi, platform yang sama juga dapat digunakan untuk membangun dialog. Komunitas dapat menyelenggarakan diskusi lintas iman, akademisi dapat menjelaskan isu kompleks dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, tokoh agama dapat membangun komunikasi lintas kelompok, dan generasi muda dapat mengakses perspektif yang sebelumnya sulit mereka temui.

Sebagian komunitas juga menggunakan media digital untuk memperkuat narasi toleransi, dialog lintas iman, dan kehidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak sepenuhnya

menentukan arah percakapan. Ia menyediakan kemungkinan, sedangkan kualitas interaksi sangat bergantung pada aktor, komunitas, serta budaya komunikasi yang dibangun di dalamnya.

Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna bukan sekadar apakah media digital baik atau buruk, melainkan praktik sosial seperti apa yang dibangun melalui media tersebut. Platform yang sama dapat menjadi ruang pembelajaran, dialog, dan solidaritas, tetapi juga dapat menjadi ruang penyebaran stereotip, kebencian, atau eksklusivisme apabila tidak disertai tanggung jawab komunikasi.

F. Literasi Digital dan Perebutan Makna

Tantangan terbesar dalam ruang publik digital bukan hanya banyaknya informasi, tetapi kemampuan menilai informasi. Seseorang dapat memiliki akses ke ribuan sumber, tetapi akses tidak otomatis menghasilkan pemahaman yang baik. Karena itu, literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi.

Literasi digital mencakup kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan fakta dari pendapat, mengenali manipulasi emosi, dan menyadari bahwa algoritma ikut memengaruhi apa yang terlihat di layar. Dalam konteks keberagaman, literasi juga membutuhkan kemampuan membaca representasi identitas dengan lebih kritis: apakah sebuah konten benar-benar menjelaskan kelompok lain, apakah ia hanya menggunakan stereotip, dan apakah informasi yang disajikan memiliki konteks yang cukup.

Kemampuan verifikasi yang lemah membuat masyarakat lebih rentan terhadap informasi yang memperkuat polarisasi dan eksklusivisme. Karena itu, literasi digital sebenarnya merupakan bagian dari kemampuan hidup bersama. Ia membantu masyarakat berinteraksi

dengan perbedaan tanpa segera terjebak dalam prasangka atau penolakan.

Ruang publik digital memperlihatkan bahwa makna tidak pernah benar-benar selesai. Satu peristiwa dapat ditafsirkan berbeda oleh kelompok yang berbeda, satu simbol dapat dianggap biasa oleh sebagian orang tetapi sensitif bagi yang lain, dan satu ungkapan keagamaan dapat dibaca sebagai ekspresi identitas sekaligus dipahami secara berbeda oleh pihak lain.

Di sinilah ruang publik menjadi arena negosiasi. Intelektual keagamaan, akademisi, tokoh agama, komunitas, media, dan pengguna biasa sama-sama terlibat dalam produksi makna, meskipun tidak semuanya memiliki kekuatan yang sama. Jaringan yang sehat karena itu tidak cukup hanya mampu menyebarkan gagasan; ia juga perlu menciptakan ruang tempat perbedaan dapat dibicarakan tanpa segera berubah menjadi permusuhan.

Ketika perbedaan bertemu dengan polarisasi, eksklusivisme, identitas yang merasa terancam, dan ruang digital yang terfragmentasi, multikulturalisme menghadapi ujian yang lebih nyata. Pembahasan inilah yang membawa kita menuju Bab 7: Ketika Keberagaman Menghadapi Resistensi.

"Ruang digital bukan hanya tempat informasi beredar, tetapi arena tempat otoritas dibentuk, identitas ditegaskan, dan makna terus diperebutkan."

BAB 7
KETIKA KEBERAGAMAN MENGHADAPI RESISTENSI

Keberagaman tidak selalu diterima dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, perjumpaan dengan perbedaan membuka kesempatan untuk belajar, memperluas pengalaman, dan membangun kerja sama. Namun bagi sebagian lainnya, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan kegelisahan karena nilai, identitas, dan pola kehidupan yang selama ini dianggap stabil terasa sedang dipertanyakan atau bahkan terancam.

Di sinilah resistensi terhadap keberagaman perlu dipahami secara lebih hati-hati. Resistensi tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka. Ia dapat hadir sebagai penolakan terhadap dialog, keengganan berinteraksi dengan kelompok berbeda, kecurigaan terhadap program lintas agama, penegasan batas identitas, atau kecenderungan membangun ruang sosial yang hanya dihuni oleh orang-orang dengan pandangan serupa.

Pengalaman masyarakat urban yang menjadi pijakan buku ini memperlihatkan bahwa keberagaman membutuhkan proses negosiasi yang panjang. Program toleransi dapat menghadapi penolakan ketika sebagian masyarakat memandang dialog lintas identitas sebagai ancaman terhadap keyakinan atau identitas kelompoknya. Karena itu, resistensi tidak cukup hanya dikutuk atau disederhanakan. Ia perlu dipahami dari mana rasa terancam itu muncul, bagaimana ia diperkuat, dan bagaimana ruang perjumpaan dapat dibangun tanpa menghapus identitas masing-masing pihak.

A. Ketika Perubahan Menimbulkan Rasa Tidak Pasti

Globalisasi membawa banyak peluang, tetapi juga menghadirkan ketidakpastian. Perubahan teknologi, arus informasi, mobilitas manusia, budaya populer, dan perkembangan media membuat masyarakat berhadapan dengan situasi yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Identitas yang dahulu dibentuk terutama oleh keluarga, lingkungan lokal, dan institusi keagamaan kini berinteraksi dengan beragam gagasan dari luar.

Sebagian orang merespons perubahan tersebut dengan keterbukaan dan melihat dunia yang semakin terhubung sebagai kesempatan untuk memperluas pengetahuan serta jaringan. Sebagian lainnya justru mencari kepastian yang lebih kuat. Dalam situasi penuh perubahan, identitas dapat menjadi sumber rasa aman karena keyakinan, komunitas, tradisi, dan simbol kelompok memberikan orientasi ketika dunia terasa semakin kompleks.

Olivier Roy membantu menjelaskan bahwa globalisasi dapat memisahkan ekspresi keagamaan dari konteks budaya lokalnya, sehingga sebagian identitas agama menjadi lebih mudah bergerak lintas wilayah dan jaringan. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut dapat menghasilkan bentuk identitas yang lebih tegas dan lebih berjarak dari tradisi sosial setempat.

Karena itu, ketegasan identitas tidak boleh langsung dibaca sebagai masalah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana identitas digunakan dalam hubungan dengan orang lain. Identitas menjadi problematis ketika keberadaannya hanya dapat dipertahankan melalui penolakan terhadap kelompok berbeda.

B. Dari Perbedaan menuju Polarisasi

Perbedaan adalah bagian normal dari masyarakat. Orang dapat memiliki pandangan keagamaan, budaya, maupun sosial yang berbeda tanpa harus menjadi lawan satu sama lain. Polarisasi muncul ketika perbedaan mulai membentuk dua atau lebih kubu yang semakin sulit berkomunikasi.

Dalam kondisi seperti itu, orang tidak lagi hanya berbeda pendapat. Kelompok lain mulai dipahami melalui kategori yang semakin sederhana: 'kami' dan 'mereka', 'benar' dan 'salah', atau 'aman' dan 'mengancam'. Penyederhanaan ini membuat perbedaan yang semula dapat dinegosiasikan menjadi semakin sulit dibicarakan.

Ruang digital dapat memperkuat kecenderungan tersebut ketika pengguna lebih sering berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Informasi yang terus menguatkan keyakinan kelompok sendiri dapat membuat narasi pihak lain semakin asing dan mudah dicurigai. Sumber yang menjadi pijakan buku ini menunjukkan bahwa polarisasi digital berkaitan dengan fragmentasi wacana keagamaan serta berkurangnya dialog lintas kelompok.

Polarisasi juga dapat memengaruhi kehidupan di luar layar. Hubungan sosial, pilihan komunitas, pertemanan, dan penggunaan ruang publik dapat ikut terbagi berdasarkan kedekatan identitas. Karena itu, tantangan keberagaman bukan sekadar membuat orang yang berbeda berada di tempat yang sama, melainkan menjaga agar mereka tetap mampu berbicara satu sama lain.

C. Ketika Dialog Dianggap Mengancam Identitas

Dialog sering dipromosikan sebagai solusi bagi ketegangan sosial, tetapi dialog sendiri dapat menghadapi resistensi. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa berinteraksi terlalu dekat dengan

kelompok lain akan melemahkan keyakinannya. Ada pula kekhawatiran bahwa dialog antaragama berarti menyamakan semua agama atau mengaburkan batas teologis.

Padahal dialog tidak harus bekerja seperti itu. Dialog tidak meminta seseorang meninggalkan keyakinannya, melainkan menuntut kemampuan untuk memahami mengapa orang lain melihat dunia dengan cara yang berbeda. Perbedaan teologis dapat tetap dipertahankan, sementara hubungan sosial tetap dibangun dengan dasar saling menghormati.

Pengalaman sejumlah komunitas plural menunjukkan bahwa praktik toleransi membutuhkan proses negosiasi sosial yang panjang karena setiap kelompok membawa sejarah, kepentingan, pengalaman, dan sensitivitas identitas yang berbeda. Karena itu, toleransi tidak dapat dibangun secara instan melalui program administratif atau pertemuan simbolik semata.

Dialog formal terkadang berhenti pada kehadiran simbolik: peserta datang ke seminar, duduk bersama, mendengarkan pembicara, berfoto, lalu kembali ke komunitas masing-masing tanpa hubungan lanjutan. Jika pola ini terus berulang, dialog mudah berubah menjadi seremoni. Karena itu, kualitas dialog tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari keberlanjutan hubungan sosial setelah kegiatan selesai.

D. Fragmentasi Komunitas dan Ruang Bersama

Masyarakat keagamaan bukan kelompok yang seragam. Di dalam satu tradisi agama dapat terdapat berbagai pandangan, organisasi, generasi, jaringan pendidikan, dan gaya keberagamaan. Perbedaan internal ini penting untuk dipahami karena istilah seperti 'umat beragama', 'kelompok agama', atau 'komunitas agama' sering

membuat kita membayangkan kesatuan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.

Modernitas dan media digital semakin memperluas keragaman tersebut. Sumber pengetahuan bertambah, figur otoritatif semakin banyak, komunitas baru muncul, dan masyarakat dapat memilih jaringan keagamaan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan maupun pandangannya. Konsekuensinya adalah fragmentasi.

Fragmentasi sebenarnya tidak selalu buruk karena dapat menunjukkan keragaman pemikiran. Masalah muncul ketika perbedaan internal membuat komunikasi terputus dan setiap kelompok hanya mengakui legitimasi jaringan sendiri. Dalam situasi seperti itu, membangun agenda bersama menjadi semakin sulit.

Resistensi terhadap keberagaman juga muncul ketika perbedaan memasuki ruang yang digunakan bersama. Pertanyaan tentang siapa yang boleh tampil, simbol apa yang dapat digunakan, kegiatan apa yang dianggap pantas, dan bagaimana kelompok dengan jumlah berbeda memperoleh ruang menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya merupakan persoalan sikap pribadi. Ia juga berkaitan dengan institusi, aturan, distribusi ruang, dan rasa keadilan.

Dalam konteks urban yang menjadi basis empiris buku ini, ketegangan mengenai keberagaman muncul dalam perdebatan tentang ekspresi budaya, simbol, kebebasan kelompok tertentu, dan penggunaan ruang publik. Jika suatu kelompok merasa terus-menerus tidak memperoleh ruang yang wajar, rasa tidak percaya dapat tumbuh. Sebaliknya, jika perubahan dilakukan tanpa komunikasi dengan masyarakat, sebagian kelompok dapat merasa kehilangan kendali atas lingkungan sosialnya. Karena itu, kehidupan multikultural membutuhkan mekanisme negosiasi yang dipercaya oleh berbagai pihak.

E. Resistensi dan Ekosistem Perjumpaan

Menghadapi resistensi tidak berarti bahwa perbedaan harus dihindari. Justru resistensi menunjukkan bahwa kehidupan bersama membutuhkan kerja yang lebih dalam. Masyarakat tidak dapat membangun toleransi hanya dengan menyatakan bahwa keberagaman adalah sesuatu yang baik karena pernyataan normatif tidak otomatis mengubah pengalaman sosial.

Orang perlu memiliki pengalaman berinteraksi dan bekerja bersama. Mereka perlu melihat bahwa kelompok yang berbeda bukan hanya kategori abstrak, melainkan manusia dengan kehidupan, kebutuhan, dan persoalan yang sama-sama nyata. Pengalaman komunitas toleransi di Bandung menunjukkan pentingnya keterlibatan warga dan tokoh lokal dalam membangun komunikasi lintas identitas. Kehidupan bersama menjadi lebih kuat ketika toleransi hadir dalam interaksi sehari-hari, bukan hanya dalam program formal.

Pada saat yang sama, pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan merupakan tantangan. Ketika ruang interaksi hilang setelah suatu program berakhir, hubungan lintas kelompok dapat kembali melemah. Karena itu, strategi menghadapi resistensi tidak cukup dengan satu acara; ia membutuhkan ekosistem perjumpaan yang hadir melalui sekolah, kampus, komunitas, rumah ibadah, ruang budaya, media, dan ruang publik sehari-hari.

Semakin banyak ruang yang memungkinkan interaksi secara aman dan setara, semakin kecil kemungkinan kelompok lain hanya dikenal melalui stereotip. Perjumpaan yang berulang membantu membangun kepercayaan karena orang memiliki kesempatan untuk mengenali pihak lain melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui narasi dari kejauhan.

F. Dari Resistensi menuju Negosiasi

Resistensi terhadap keberagaman tidak selalu dapat dihilangkan seluruhnya. Dalam masyarakat yang terbuka, perbedaan pendapat mengenai agama, budaya, nilai moral, dan kehidupan sosial akan tetap ada. Tujuannya bukan membuat semua orang memiliki pandangan yang sama, melainkan membangun mekanisme agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi penolakan terhadap martabat dan hak orang lain.

Di sinilah konsep negosiasi menjadi penting. Kehidupan bersama selalu membutuhkan penyesuaian. Tidak semua tuntutan dapat diterima, tidak semua kekhawatiran dapat diabaikan, dan tidak semua perbedaan dapat diselesaikan. Namun perbedaan dapat dibicarakan melalui aturan dan ruang yang memungkinkan setiap pihak didengar.

Multikulturalisme yang matang karena itu bukan masyarakat tanpa konflik. Ia adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola konflik tanpa menghancurkan hubungan sosial. Dari sudut ini, resistensi justru dapat menjadi indikator tentang bagian mana dari kehidupan bersama yang belum memiliki kepercayaan cukup, bagian mana yang masih dianggap mengancam, dan bagian mana yang membutuhkan jembatan sosial baru.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya mengurangi penolakan, tetapi menemukan sumber daya sosial yang sudah dimiliki masyarakat untuk membangun jembatan tersebut. Salah satu sumber daya itu adalah kearifan lokal: nilai, kebiasaan, bahasa sosial, dan praktik budaya yang selama ini membantu masyarakat mengelola perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan inilah yang membawa kita menuju Bab 8: Kearifan Lokal sebagai Modal Hidup Bersama.

"Keberagaman tidak diuji ketika semua orang sepakat, tetapi ketika masyarakat tetap mampu menjaga hubungan di tengah perbedaan yang sulit dipertemukan."

BAB 8
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL HIDUP BERSAMA

Masyarakat tidak selalu memulai kehidupan bersama dari teori. Jauh sebelum istilah multikulturalisme, pluralisme, atau dialog antaragama digunakan dalam diskursus akademik, banyak komunitas telah memiliki cara sendiri untuk mengelola perbedaan melalui kebiasaan, bahasa, etika pergaulan, praktik bertetangga, tradisi tolong-menolong, serta aturan tidak tertulis tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain.

Di sinilah kearifan lokal memperoleh maknanya. Kearifan lokal bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi kumpulan nilai, kebiasaan, simbol, dan praktik sosial yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat majemuk, nilai-nilai semacam ini dapat menjadi modal sosial untuk menjaga hubungan lintas identitas.

Pengalaman Bandung menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak hanya dibentuk oleh kebijakan formal atau wacana akademik. Budaya lokal, komunikasi antarwarga, keterlibatan tokoh masyarakat, dan praktik keseharian juga berperan dalam membangun relasi yang lebih terbuka. Namun kearifan lokal tidak boleh diperlakukan secara romantis seolah-olah setiap tradisi selalu menghasilkan harmoni. Nilai lokal tetap perlu dibaca secara kritis karena tradisi dapat berubah, diperdebatkan, dan digunakan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda.

A. Kearifan Lokal Bukan Sekadar Tradisi

Istilah kearifan lokal sering dipahami terlalu sederhana sebagai adat atau kebiasaan lama. Padahal maknanya lebih luas. Kearifan lokal mencakup cara masyarakat memahami hubungan antarmanusia,

menentukan batas perilaku yang dianggap pantas, membangun rasa hormat, serta memelihara kehidupan bersama.

Kearifan lokal hidup dalam bahasa, gestur, cara menerima tamu, kebiasaan saling membantu, cara menyelesaikan konflik, dan ingatan kolektif masyarakat. Karena itu, ia tidak selalu berbentuk aturan tertulis. Kekuatannya justru sering terletak pada kebiasaan sosial yang dianggap wajar dan dipraktikkan berulang kali.

Dalam masyarakat multikultural, kebiasaan semacam ini dapat berfungsi sebagai jembatan sosial karena menyediakan bahasa yang lebih dekat dengan pengalaman warga dibandingkan istilah akademik yang abstrak. Ia membuat nilai hidup bersama terasa sebagai bagian dari keseharian, bukan sekadar gagasan yang datang dari luar.

B. Someah dan Etika Menerima Yang Lain

Dalam budaya Sunda, salah satu nilai yang sering disebut adalah someah. Secara sederhana, someah merujuk pada keramahan, keterbukaan, dan sikap menerima orang lain dengan baik. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga dengan cara seseorang menempatkan orang lain dalam hubungan sosial.

Sumber yang menjadi pijakan buku ini menunjukkan bahwa sebagian informan melihat nilai seperti someah dan penghormatan terhadap orang lain sebagai bagian dari modal budaya yang mendukung penerimaan terhadap perbedaan agama maupun etnis di Bandung.

Namun someah tidak seharusnya dipahami sebagai bukti bahwa masyarakat otomatis toleran. Keramahan dapat hadir di permukaan sementara jarak sosial tetap ada. Karena itu, nilai lokal baru memiliki kekuatan sosial ketika diwujudkan dalam hubungan yang nyata: bekerja bersama, bertetangga, saling membantu, dan berbagi ruang.

Dengan kata lain, kearifan lokal tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang bersikap sopan, tetapi tentang bagaimana masyarakat membangun kepercayaan melalui interaksi yang berulang.

C. Hidup Bersama dalam Praktik Sehari-hari

Keberagaman paling nyata tidak selalu ditemukan dalam seminar. Ia hadir di pasar, sekolah, kampus, lingkungan tempat tinggal, ruang kerja, rumah ibadah yang berdiri berdekatan, acara warga, dan berbagai perjumpaan kecil yang sering dianggap biasa. Justru di ruang-ruang seperti inilah hubungan sosial dibentuk.

Kajian tentang Kampung Toleransi di Bandung menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak hanya tumbuh karena program formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari, komunikasi lintas identitas, serta keterlibatan komunitas lokal.

Pengalaman ini penting karena menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya sesuatu yang diajarkan, tetapi juga dipraktikkan. Orang belajar menerima perbedaan ketika memiliki pengalaman konkret bahwa kelompok lain bukan ancaman. Mereka melihat tetangganya membantu ketika ada kesulitan, bekerja bersama dalam kegiatan sosial, berbagi ruang, dan membangun hubungan yang perlahan mengurangi prasangka.

Dari pengalaman sehari-hari semacam inilah kohesi sosial tumbuh. Hubungan yang berulang membuat orang mengenal pihak lain sebagai manusia yang nyata, bukan hanya sebagai kategori identitas.

D. Glokalisasi dan Modal Sosial

Globalisasi tidak selalu berarti bahwa budaya lokal akan hilang. Roland Robertson menggunakan istilah glocalization untuk menjelaskan bagaimana pengaruh global berinteraksi dengan konteks lokal. Nilai

dari luar tidak selalu diterima secara utuh; ia dapat diadaptasi, ditafsirkan ulang, atau digabungkan dengan tradisi yang sudah ada.

Proses ini penting dalam memahami kehidupan keagamaan. Gagasan tentang toleransi, hak, pluralisme, dan dialog dapat memperoleh bentuk yang berbeda ketika bertemu dengan sejarah, bahasa, budaya, dan pengalaman sosial setempat. Dalam konteks Bandung, nilai global tentang keberagaman berinteraksi dengan etika lokal, praktik komunitas, jaringan keagamaan, tradisi pendidikan, dan pengalaman urban.

Masyarakat dengan demikian tidak hanya menjadi penerima globalisasi, tetapi juga penafsirnya. Mereka memilih, menyesuaikan, menolak sebagian, menerima sebagian, dan mengubah sebagian lainnya. Proses semacam ini menunjukkan bahwa identitas lokal bukan sesuatu yang pasif, melainkan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan perubahan.

Dalam masyarakat majemuk, kemampuan bernegosiasi tersebut berkaitan erat dengan modal sosial: jaringan kepercayaan, kebiasaan bekerja sama, dan hubungan yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan persoalan bersama. Nilai tentang keramahan, penghormatan, gotong royong, musyawarah, dan saling membantu dapat memperkuat hubungan jika benar-benar hidup dalam praktik.

Modal sosial tidak tumbuh hanya karena nilai tersebut disebut dalam slogan. Ia membutuhkan ruang sosial, komunitas, pertemuan, kegiatan bersama, dan hubungan yang berulang. Pengalaman Kampung Toleransi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal merupakan unsur penting dalam membangun komunikasi lintas identitas. Program akan lebih bermakna ketika warga terlibat sebagai pelaku, bukan sekadar peserta.

E. Kearifan Lokal yang Kritis dan Adaptif

Ada kecenderungan untuk membicarakan budaya lokal sebagai sesuatu yang selalu harmonis. Pandangan seperti ini perlu dihindari. Setiap masyarakat memiliki sejarah konflik, ketimpangan, batas sosial, dan praktik eksklusi. Karena itu, tidak semua kebiasaan lama harus dipertahankan hanya karena dianggap tradisi.

Kearifan lokal perlu dibaca secara kritis. Pertanyaannya bukan hanya apakah suatu nilai merupakan tradisi, tetapi juga apakah nilai tersebut menghormati martabat manusia, memungkinkan kelompok berbeda hidup bersama secara adil, memberi ruang bagi kelompok yang lebih kecil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Kearifan lokal yang relevan bukan budaya yang dibekukan, melainkan budaya yang mampu melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Tradisi dapat tetap memiliki akar tanpa harus menolak perubahan, dan nilai lokal dapat tetap hidup selama mampu menjawab persoalan masyarakat kontemporer.

Generasi muda hidup dalam dunia yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka berinteraksi dengan budaya global, menggunakan media digital, berjejaring lintas wilayah, dan memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Karena itu, kearifan lokal tidak dapat diwariskan hanya melalui nasihat; ia perlu diterjemahkan ke dalam bentuk baru.

Nilai keramahan dapat hadir dalam etika komunikasi digital, gotong royong dapat berkembang menjadi solidaritas komunitas, musyawarah dapat diterjemahkan menjadi budaya dialog, dan penghormatan terhadap tamu dapat berkembang menjadi etika menerima kelompok berbeda. Di sinilah kearifan lokal dan modernitas tidak harus dipertentangkan.

F. Dari Warisan menuju Jembatan Sosial

Kearifan lokal memiliki kekuatan ketika mampu menjadi jembatan antara agama dan budaya, generasi tua dan muda, kelompok mayoritas dan minoritas, identitas lokal dan dunia global, serta antara perbedaan dan kerja sama.

Namun jembatan tidak dibangun hanya dengan nostalgia. Ia membutuhkan aktor: tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, komunitas, generasi muda, dan jaringan sosial yang mampu menerjemahkan nilai menjadi tindakan.

Di sinilah pembahasan mengenai kearifan lokal bertemu kembali dengan tema utama buku ini, yaitu jaringan intelektual. Nilai lokal dapat hidup lebih luas ketika ada jaringan yang merawat, menjelaskan, menerjemahkan, dan mempraktikkannya dalam ruang publik.

Karena itu, kearifan lokal bukan akhir dari pembahasan. Ia merupakan salah satu fondasi untuk memahami bagaimana jaringan intelektual dapat berfungsi sebagai perekat sosial. Pembahasan inilah yang membawa kita menuju Bab 9: Jaringan Intelektual sebagai Perekat Sosial.

"Kearifan lokal menjadi bermakna bukan ketika hanya diwariskan, tetapi ketika ia mampu diterjemahkan menjadi cara hidup bersama di tengah perubahan."

BAB 9
JARINGAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEREKAT SOSIAL

Masyarakat yang majemuk tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga hubungan. Aturan dapat menentukan batas perilaku, sedangkan hubungan membangun kepercayaan. Kebijakan dapat membuka ruang, tetapi jaringan membuat orang benar-benar bertemu, berbicara, bekerja sama, dan memahami posisi satu sama lain.

Di sinilah jaringan intelektual memperoleh arti sosialnya. Jaringan intelektual bukan sekadar hubungan antara orang-orang terpelajar, tetapi mencakup relasi antara akademisi, tokoh agama, pesantren, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas lintas iman, mahasiswa, media, dan kelompok warga yang terhubung melalui pertukaran pengetahuan serta kepentingan bersama.

Dalam konteks Bandung, jaringan seperti ini tumbuh melalui forum akademik, diskusi publik, kegiatan lintas agama, kerja sosial, dan kolaborasi antarinstitusi. Perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai bridging institution yang mempertemukan komunitas berbeda, sementara akademisi dapat bertindak sebagai knowledge broker yang menghubungkan gagasan keagamaan dengan persoalan masyarakat kontemporer.

Jaringan semacam ini penting karena kohesi sosial tidak lahir dari keseragaman. Ia tumbuh dari kemampuan masyarakat membangun hubungan, kepercayaan, dan kerja sama di tengah perbedaan.

A. Jaringan sebagai Ruang Pertemuan

Jaringan intelektual bekerja pertama-tama sebagai ruang pertemuan. Orang yang berasal dari institusi, tradisi, atau pengalaman berbeda tidak selalu memiliki kesempatan untuk saling berjumpa.

Kampus, pesantren, komunitas, organisasi keagamaan, dan forum publik dapat menciptakan titik temu di antara mereka.

Dalam konteks Bandung, forum kajian akademik dan diskusi publik mempertemukan mahasiswa, akademisi, aktivis sosial, tokoh agama, dan komunitas masyarakat sipil dalam ruang yang relatif terbuka.

Pertemuan semacam ini penting karena hubungan sosial tidak dapat dibangun hanya melalui pengetahuan tentang pihak lain. Orang perlu berjumpa, mendengar secara langsung, mengajukan pertanyaan, menemukan persamaan, dan memahami perbedaan. Melalui pertemuan yang berulang, identitas lain tidak lagi hanya dikenal sebagai kategori abstrak, tetapi sebagai wajah, suara, pengalaman, dan hubungan.

Di sinilah jaringan mulai berfungsi sebagai perekat sosial: bukan dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan memperbesar peluang perjumpaan yang memungkinkan kepercayaan tumbuh.

B. Kampus dan Intelektual sebagai Penghubung

Perguruan tinggi memiliki posisi khas dalam jaringan intelektual. Ia bukan hanya tempat pendidikan formal, tetapi juga ruang produksi pengetahuan, diskusi, dan perjumpaan gagasan. Dalam konteks buku ini, sejumlah perguruan tinggi di Bandung menjadi ruang bertemunya akademisi, mahasiswa, tokoh agama, dan komunitas untuk membahas toleransi, pluralisme, hubungan antaragama, dan persoalan sosial kontemporer.

Fungsi ini membuat kampus dapat bertindak sebagai bridging institution. Ia menjembatani kelompok yang mungkin jarang berinteraksi secara langsung, menyediakan bahasa akademik untuk

membicarakan isu sensitif secara lebih terukur, dan menghubungkan refleksi teoretis dengan kebutuhan masyarakat.

Namun fungsi penghubung tidak otomatis muncul hanya karena suatu institusi bernama perguruan tinggi. Ia membutuhkan budaya dialog, keterbukaan intelektual, kemauan bekerja lintas batas, dan keterlibatan dengan masyarakat di luar kampus. Tanpa itu, kampus dapat tetap menjadi ruang tertutup yang hanya berbicara kepada dirinya sendiri.

Di dalam jaringan semacam ini, intelektual juga berperan sebagai penghubung pengetahuan. Mereka tidak hanya memproduksi gagasan, tetapi juga menerjemahkan, menjelaskan, menghubungkan, dan memediasi. Sumber yang menjadi pijakan buku ini menggambarkan akademisi sebagai knowledge brokers yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan, pengetahuan akademik, dan persoalan masyarakat kontemporer.

Peran tersebut penting ketika bahasa agama, akademik, dan kebijakan tidak saling bertemu. Intelektual yang mampu bergerak di antara ruang-ruang ini membantu membangun jembatan komunikasi. Namun jaringan yang sehat tidak bergantung pada satu figur; pengetahuan perlu bergerak melalui banyak simpul agar tetap hidup ketika satu aktor tidak lagi aktif.

C. Dari Dialog menuju Kerja Bersama

Jaringan sosial menjadi lebih kuat ketika hubungan tidak berhenti pada diskusi. Dialog penting, tetapi kerja bersama sering menghasilkan kepercayaan yang lebih dalam. Kegiatan pendidikan, kerja kemanusiaan, pendampingan masyarakat, program sosial, kegiatan lintas komunitas, dan respons terhadap persoalan bersama dapat mengubah hubungan yang semula formal menjadi kolaboratif.

Sumber buku ini menunjukkan bahwa jaringan intelektual keagamaan berkembang dari pola hubungan yang bersifat seremonial menuju jejaring yang lebih kolaboratif dan berbasis pengetahuan.

Hubungan seremonial biasanya berhenti pada pertemuan, sedangkan hubungan kolaboratif menghasilkan pengalaman bersama. Ketika orang dari kelompok berbeda menyelesaikan persoalan bersama, identitas tidak lagi menjadi satu-satunya dasar hubungan; mereka mulai memiliki pengalaman, tanggung jawab, dan tujuan yang sama.

Dari pengalaman semacam inilah kepercayaan dapat tumbuh. Jaringan menjadi lebih kuat ketika perjumpaan tidak hanya menghasilkan percakapan, tetapi juga tindakan yang memberi manfaat nyata.

D. Civic Engagement dan Solidaritas Sosial

Jaringan intelektual memperoleh kekuatan yang lebih besar ketika terhubung dengan keterlibatan warga. Dalam konteks ini, civic engagement dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial, pendidikan, dialog publik, dan kerja kemanusiaan lintas identitas.

Gagasan ini penting karena multikulturalisme tidak cukup dibangun melalui regulasi atau wacana akademik. Ia membutuhkan partisipasi. Sumber yang mendasari buku ini menunjukkan keterlibatan komunitas lintas iman, organisasi mahasiswa, gerakan sosial berbasis rumah ibadah, dan komunitas kreatif urban dalam membangun solidaritas sosial di Bandung.

Partisipasi semacam ini membuat toleransi memiliki bentuk konkret. Ia tidak berhenti pada sikap, tetapi menjadi tindakan. Ketika komunitas yang berbeda bekerja bersama untuk pendidikan,

kemanusiaan, lingkungan, atau kebutuhan sosial lainnya, mereka membangun pengalaman bersama yang dapat melampaui sekat identitas.

Dalam konteks ini, jaringan intelektual bukan hanya jaringan orang yang berbicara, tetapi juga jaringan orang yang bertindak. Kohesi sosial menguat ketika pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi bertemu dalam praktik.

E. Modal Sosial, Kekuasaan, dan Batas Jaringan

Jaringan yang kuat memiliki dua sumber daya penting: pengetahuan dan kepercayaan. Pengetahuan tanpa kepercayaan sulit bergerak, sedangkan kepercayaan tanpa pengetahuan dapat kehilangan arah. Karena itu, modal intelektual dan modal sosial saling berkaitan.

Pierre Bourdieu membantu melihat bahwa pengetahuan, legitimasi, hubungan sosial, dan posisi institusional memiliki kekuatan dalam membentuk arena sosial. Dalam jaringan keagamaan, perguruan tinggi, akademisi, tokoh agama, dan komunitas membawa modal yang berbeda: ada yang memiliki pengetahuan, legitimasi moral, akses masyarakat, jaringan, atau kemampuan komunikasi.

Ketika sumber daya tersebut terhubung, jaringan lebih mampu membangun dialog dan merespons persoalan sosial. Namun ketimpangan tetap dapat muncul: aktor bermodal besar dapat mendominasi percakapan, kelompok kecil hanya menjadi peserta, dan komunitas akar rumput menjadi objek kegiatan tanpa benar-benar memiliki suara.

Karena itu, jaringan yang sehat membutuhkan kesadaran terhadap distribusi kekuasaan di dalam dirinya sendiri. Jaringan tidak otomatis menghasilkan kohesi sosial; ia juga dapat menjadi eksklusif,

elitis, bergantung pada figur tertentu, terputus dari masyarakat luas, atau hanya aktif ketika ada program.

Kegiatan lintas kelompok dapat melemah setelah program berakhir jika tidak ada struktur sosial yang menjaga interaksi. Karena itu, jaringan memerlukan regenerasi, pembagian peran, evaluasi, hubungan dengan komunitas lokal, dan keterbukaan terhadap kritik.

Jaringan yang kuat bukan jaringan yang selalu sepakat. Ia adalah jaringan yang mampu mempertahankan komunikasi ketika terjadi perbedaan.

F. Dari Jaringan menuju Kohesi Sosial

Kohesi sosial tidak berarti semua orang berpikir sama, dan tidak pula berarti konflik hilang. Kohesi sosial berarti masyarakat memiliki cukup kepercayaan, hubungan, dan mekanisme kerja sama untuk tetap hidup bersama ketika perbedaan muncul.

Jaringan intelektual berkontribusi melalui ruang pertemuan, produksi pengetahuan, penerjemahan gagasan, kerja sama, dan partisipasi warga. Dalam konteks Bandung, kolaborasi antara kampus, pesantren, komunitas lintas iman, organisasi sosial, dan media menunjukkan bahwa kehidupan multikultural membutuhkan relasi yang kolaboratif dan partisipatif.

Di sinilah jaringan intelektual menjadi lebih dari sekadar jaringan pengetahuan. Ia menjadi infrastruktur sosial yang menghubungkan orang, menyebarkan gagasan, membuka ruang dialog, menghasilkan kerja bersama, dan membantu membangun kepercayaan.

Namun jaringan tetap membutuhkan ekosistem yang lebih luas agar pengaruhnya tidak berhenti pada lingkaran tertentu.

Tantangannya adalah bagaimana pengetahuan, komunitas, media, pendidikan, dan ruang sosial saling memperkuat secara berkelanjutan.

Pembahasan inilah yang membawa kita menuju Bab 10: Merawat Keberagaman - Dari Wacana menuju Ekosistem.

"Jaringan intelektual menjadi perekat sosial ketika pengetahuan tidak berhenti pada percakapan, tetapi berubah menjadi kepercayaan, kolaborasi, dan pengalaman hidup bersama."

BAB 10
MERAWAT KEBERAGAMAN: DARI WACANA MENUJU EKOSISTEM

Keberagaman tidak cukup dipahami; ia perlu dirawat. Pemahaman memberi dasar untuk melihat perbedaan secara lebih jernih, tetapi kehidupan bersama membutuhkan sesuatu yang lebih dari pengetahuan. Ia membutuhkan kebiasaan, institusi, jaringan, ruang perjumpaan, media, pendidikan, serta partisipasi warga yang bekerja secara berkelanjutan.

Di sinilah tantangan sesungguhnya berada. Banyak gagasan tentang toleransi, pluralisme, dan dialog berhenti pada wacana: dibicarakan dalam seminar, dijadikan tema program, dimasukkan ke dalam dokumen, lalu kehilangan daya setelah kegiatan selesai. Padahal sumber yang menjadi pijakan buku ini menunjukkan bahwa promosi multikulturalisme di masyarakat urban tidak dapat mengandalkan pendekatan tunggal yang formalistik atau normatif; ia membutuhkan pola yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis jaringan sosial.

Karena itu, keberagaman perlu dilihat sebagai ekosistem. Ekosistem tidak bergantung pada satu aktor, melainkan hidup karena berbagai unsur saling terhubung: pendidikan, agama, budaya, media, komunitas, ruang publik, generasi muda, dan warga. Ketika unsur-unsur ini bekerja sendiri-sendiri, pengaruhnya terbatas; ketika terhubung, keberagaman memperoleh daya tahan.

A. Dari Wacana menuju Praktik

Wacana tetap memiliki peran penting karena memberi bahasa, membentuk konsep, membuka diskusi, dan membantu masyarakat memahami persoalan. Namun wacana memiliki keterbatasan jika tidak terhubung dengan praktik. Orang dapat sepakat bahwa toleransi penting,

tetapi tetap hidup dalam ruang sosial yang terpisah; institusi dapat berbicara tentang dialog tanpa membangun pertemuan yang berkelanjutan; komunitas dapat menyelenggarakan kegiatan lintas agama, tetapi hubungan berhenti ketika program selesai.

Inilah mengapa keberagaman membutuhkan struktur sosial yang lebih tahan lama. Sumber buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan promosi multikulturalisme sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor sosial membangun relasi lintas institusi dan lintas identitas secara berkelanjutan.

Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat memiliki program keberagaman, tetapi apakah program tersebut menghasilkan hubungan, apakah hubungan itu berlanjut, dan apakah dari hubungan tersebut tumbuh kebiasaan sosial baru.

B. Kampus, Pesantren, dan Komunitas sebagai Ekosistem Pengetahuan

Salah satu pola penting yang muncul dari sumber buku ini adalah kolaborasi antara kampus, pesantren, dan komunitas. Ketiganya memiliki kekuatan yang berbeda. Perguruan tinggi memiliki kapasitas produksi pengetahuan, penelitian, analisis kritis, dan ruang akademik. Pesantren memiliki kedekatan kultural, legitimasi moral, serta hubungan langsung dengan masyarakat. Komunitas memiliki fleksibilitas, pengalaman lapangan, dan kemampuan bergerak dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Sumber penelitian menempatkan kolaborasi kampus-pesantren-komunitas sebagai salah satu pendekatan utama dalam pengembangan multikulturalisme berbasis jaringan intelektual. Kekuatan kolaborasi tidak terletak pada kesamaan fungsi, tetapi pada perbedaan fungsi yang saling melengkapi.

Kampus dapat menghasilkan gagasan, pesantren memberi legitimasi kultural dan religius, sedangkan komunitas menerjemahkan gagasan

menjadi praktik. Jika ketiganya berjalan sendiri-sendiri, jangkauannya terbatas. Jika terhubung, terbentuk ekosistem pengetahuan dan tindakan.

C. Media Digital dan Literasi Multikultural

Ekosistem keberagaman hari ini tidak mungkin mengabaikan media digital. Media sosial, video, podcast, forum daring, dan platform digital telah menjadi bagian dari cara masyarakat belajar, berdebat, membentuk identitas, dan memahami agama. Sumber buku ini menunjukkan bahwa media digital menciptakan peluang sekaligus tantangan: ia memperluas akses terhadap narasi toleransi dan dialog, tetapi juga dapat menjadi ruang fragmentasi otoritas, polarisasi, dan penyebaran narasi eksklusif.

Karena itu, media digital tidak cukup diperlakukan sebagai alat penyebaran informasi. Ia perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem sosial. Konten keberagaman harus mampu berkomunikasi dengan budaya digital: bahasanya dapat dipahami, formatnya relevan, namun kedalamannya tidak dikorbankan demi popularitas.

Sumber buku ini mengangkat pendekatan komunikasi keagamaan digital berbasis lokalitas, yaitu ketika nilai toleransi, budaya lokal, dan bahasa populer dipertemukan agar pesan berakar pada pengalaman masyarakat. Prinsipnya bukan sekadar hadir di media sosial, melainkan menggunakan ruang digital untuk memperluas dialog, memperkuat literasi, dan menghubungkan orang dengan ruang sosial nyata.

Di sinilah literasi multikultural menjadi penting. Literasi ini tidak berhenti pada pengetahuan bahwa masyarakat berbeda, tetapi mencakup kemampuan memahami identitas secara kritis, membaca informasi dengan hati-hati, mengenali stereotip, menguji narasi provokatif, memverifikasi informasi, dan mempertahankan komunikasi ketika berhadapan dengan pandangan berbeda. Dengan demikian, literasi multikultural lebih tepat dipahami sebagai kompetensi sosial daripada sekadar materi pendidikan.

D. Civic Engagement dan Kepemilikan Sosial

Ekosistem sosial tidak dapat dibangun hanya oleh institusi; ia membutuhkan warga. Di sinilah civic engagement menjadi penting. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dialog, kemanusiaan, lingkungan, dan komunitas membuat keberagaman hadir sebagai pengalaman nyata.

Sumber buku ini menunjukkan bahwa komunitas lintas iman, organisasi mahasiswa, gerakan sosial berbasis rumah ibadah, dan komunitas kreatif dapat memberi kontribusi pada solidaritas sosial di Bandung. Keterlibatan seperti ini mengubah posisi masyarakat dari penonton menjadi pelaku, dari penerima program menjadi pembentuk ruang sosial, dan dari objek kebijakan menjadi bagian dari proses kehidupan bersama.

Karena itu, keberhasilan program keberagaman tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat ikut memiliki program tersebut, terlibat dalam perencanaan, mempunyai ruang mengambil keputusan, serta mempertahankan hubungan setelah kegiatan selesai.

E. Dari Program menuju Kebiasaan Sosial

Salah satu kelemahan banyak program sosial adalah sifatnya yang temporer: ada kegiatan, anggaran, peserta, dan dokumentasi, lalu selesai. Ekosistem bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak bergantung pada momentum, tetapi membangun kebiasaan.

Dalam ekosistem yang berkelanjutan, pertemuan lintas kelompok menjadi rutin, kolaborasi menjadi normal, generasi baru dilibatkan, pengetahuan diwariskan, ruang digital tetap aktif, dan hubungan antarinstitusi tidak bergantung pada satu proyek. Di sinilah keberlanjutan menjadi ukuran penting.

Ekosistem yang kuat memerlukan regenerasi, mekanisme evaluasi, pembagian peran, ruang kritik, serta kemampuan beradaptasi. Tantangan keberagaman terus berubah, sehingga cara merawatnya juga harus dapat berkembang.

F. Empat Pilar Ekosistem Keberagaman

Jika seluruh pembahasan buku ini dirangkum, terdapat empat pilar yang dapat dibaca sebagai dasar ekosistem keberagaman. Pertama, kolaborasi institusi: kampus, pesantren, komunitas, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil perlu terhubung melalui kerja yang berkelanjutan.

Kedua, komunikasi digital yang kontekstual: ruang digital perlu digunakan bukan hanya untuk menyebarkan pesan, tetapi untuk membangun literasi dan dialog yang terhubung dengan budaya serta pengalaman lokal. Ketiga, literasi multikultural: masyarakat memerlukan kemampuan memahami perbedaan, membaca informasi secara kritis, dan berkomunikasi melampaui batas identitas. Keempat, civic engagement: keberagaman perlu diterjemahkan menjadi keterlibatan warga dalam persoalan bersama.

Empat pendekatan ini juga muncul dalam sumber penelitian sebagai kolaborasi kampus-pesantren-komunitas, komunikasi digital berbasis lokalitas, literasi multikulturalisme urban, dan jaringan intelektual berbasis civic engagement. Namun kerangka tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai formula yang berlaku sama di setiap tempat. Setiap masyarakat perlu menerjemahkannya sesuai sejarah, budaya, aktor, dan persoalan lokalnya.

Ekosistem keberagaman bukan proyek untuk membuat semua orang berpikir sama. Identitas agama, tradisi, perbedaan tafsir, dan perdebatan tetap ada. Yang perlu dijaga adalah agar semua itu tidak menghancurkan kemampuan masyarakat untuk hidup bersama.

Keberagaman, dengan demikian, bukan keadaan yang selesai sekali dibangun, melainkan proses yang perlu dirawat, diperbarui, dikritik, dan diwariskan. Tujuannya bukan keseragaman, melainkan kemampuan sosial untuk berbeda tanpa saling menghapus, memiliki keyakinan tanpa kehilangan penghormatan terhadap martabat orang lain, berbicara ketika terjadi ketegangan, dan bekerja bersama ketika muncul persoalan yang menyentuh semua warga.

Ketika pendidikan, agama, komunitas, media, budaya lokal, dan keterlibatan warga saling terhubung, keberagaman tidak lagi hanya dibicarakan. Ia menjadi bagian dari cara masyarakat hidup. Dari titik inilah buku ini sampai pada pertanyaan terakhir: bagaimana kita dapat hidup bersama tanpa harus menjadi seragam? Pertanyaan tersebut membawa kita menuju epilog: Hidup Bersama tanpa Menjadi Seragam.

"Keberagaman akan bertahan bukan karena sering dibicarakan, tetapi karena ia tumbuh menjadi kebiasaan, hubungan, dan ekosistem yang terus dirawat."

EPILOG
HIDUP BERSAMA TANPA MENJADI SERAGAM

Pada akhirnya, keberagaman bukan persoalan tentang bagaimana membuat semua orang menjadi sama. Ia adalah persoalan tentang bagaimana manusia dapat tetap hidup bersama ketika mereka tidak sama.

Perbedaan keyakinan, tradisi, cara memahami agama, latar budaya, pengalaman sosial, dan pandangan terhadap dunia akan selalu ada. Globalisasi membuat perjumpaan dengan perbedaan semakin intens. Melalui mobilitas manusia dan ruang digital, gagasan yang dahulu terpisah oleh jarak kini dapat bertemu dengan cepat. Agama pun tidak hilang dalam proses tersebut; ia berubah, beradaptasi, membentuk jaringan baru, dan terus mengambil tempat dalam ruang publik.

Namun kedekatan tidak otomatis melahirkan pemahaman. Arus informasi yang cepat dapat membuka ruang belajar, tetapi juga dapat memperkuat prasangka. Media digital dapat menjadi ruang dialog, tetapi pada saat yang sama dapat membentuk lingkaran komunikasi yang semakin tertutup. Identitas dapat menjadi sumber makna dan rasa memiliki, tetapi juga dapat berubah menjadi batas yang menjauhkan satu kelompok dari kelompok lain.

Karena itu, toleransi tidak dapat dibangun melalui kegiatan sesaat atau pendekatan administratif semata. Ia membutuhkan proses negosiasi, keterlibatan masyarakat, dan struktur sosial yang memungkinkan hubungan terus berlangsung. Hidup bersama tidak terjadi dengan sendirinya; ia perlu dipelajari, dilatih, dirawat, dan diwariskan.

Sepanjang buku ini, jaringan intelektual keagamaan terlihat sebagai salah satu unsur penting dalam proses tersebut. Kampus, pesantren, organisasi keagamaan, komunitas, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, media, dan masyarakat membentuk simpul-simpul yang mempertemukan

pengetahuan dengan pengalaman, agama dengan kehidupan sosial, serta identitas lokal dengan perubahan global.

Namun jaringan bukan tujuan akhir. Jaringan hanya bermakna ketika membuka perjumpaan, ketika pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, ketika dialog tidak selesai setelah seminar, ketika agama tidak hanya dibicarakan sebagai identitas tetapi hadir sebagai sumber tanggung jawab sosial, dan ketika masyarakat tidak sekadar menjadi peserta tetapi ikut menentukan bentuk kehidupan bersama.

Dalam konteks seperti itulah keberagaman menjadi pengalaman sosial, bukan hanya konsep. Bandung memberi salah satu konteks empiris untuk membaca proses tersebut. Kehidupan pendidikan, komunitas, agama, budaya, dan ruang digital yang dinamis memperlihatkan bahwa multikulturalisme selalu berada dalam proses negosiasi. Ada keterbukaan, tetapi ada pula resistensi; ada ruang dialog, tetapi ada juga fragmentasi; ada tradisi lokal yang mendukung kehidupan bersama, tetapi tradisi itu sendiri tetap perlu dibaca secara kritis.

Buku ini tidak bermaksud menghadirkan gambaran masyarakat tanpa persoalan. Keberagaman justru menjadi bermakna karena berhadapan dengan persoalan nyata: perbedaan, kecurigaan, komunikasi yang terputus, polarisasi di ruang digital, dan pengalaman kelompok yang merasa tidak didengar. Di titik-titik seperti itulah kualitas kehidupan bersama diuji.

Jawabannya tidak selalu berupa kesepakatan. Dalam masyarakat yang plural, kesepakatan penuh mungkin tidak pernah tercapai. Yang lebih penting adalah kemampuan mempertahankan hubungan ketika kesepakatan tidak tercapai. Seseorang dapat meyakini agamanya secara sungguh-sungguh tanpa menganggap keberadaan orang lain sebagai ancaman, menjaga tradisinya tanpa menutup ruang bagi tradisi lain, dan berbeda pendapat tanpa menghapus martabat pihak yang berbeda.

Di sinilah hidup bersama menemukan bentuknya yang paling manusiawi: bukan karena perbedaan hilang, tetapi karena perbedaan tidak lagi selalu diperlakukan sebagai alasan untuk menjauh.

Kearifan lokal memberi pelajaran penting dalam proses ini. Nilai keramahan, penghormatan terhadap orang lain, gotong royong, dan kebiasaan berinteraksi di tingkat komunitas memperlihatkan bahwa toleransi sering tumbuh melalui praktik yang sederhana: bertetangga, bekerja bersama, membantu ketika ada kesulitan, dan berbagi ruang kehidupan.

Namun nilai lokal tidak boleh dibekukan menjadi nostalgia. Generasi baru hidup dalam konteks yang berbeda. Ruang sosial mereka tidak hanya berada di kampung, sekolah, kampus, atau rumah ibadah, tetapi juga di layar. Karena itu, nilai lama membutuhkan bahasa baru. Keramahan perlu diterjemahkan menjadi etika digital, gotong royong menjadi solidaritas sosial, musyawarah menjadi budaya dialog, dan penghormatan terhadap sesama menjadi kemampuan berinteraksi dengan orang yang memiliki identitas berbeda.

Di sinilah lokal dan global tidak harus saling meniadakan. Keduanya dapat bertemu, saling mengoreksi, dan saling memperkaya.

Perjalanan buku ini juga menunjukkan bahwa tantangan keberagaman tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Tidak cukup menyerahkannya kepada pemerintah, tokoh agama, kampus, atau komunitas tertentu. Kehidupan bersama adalah tanggung jawab sosial yang tersebar. Ia membutuhkan pendidikan yang membangun kemampuan berpikir kritis, media yang membuka ruang percakapan, agama yang hadir dalam persoalan kemanusiaan, komunitas yang menyediakan pengalaman perjumpaan, jaringan intelektual yang menghubungkan pengetahuan dengan masyarakat, dan warga yang bersedia terlibat.

Maka persoalan utama sesungguhnya bukan bagaimana menghilangkan perbedaan, melainkan apakah kita memiliki cukup ruang untuk berbicara ketika berbeda, cukup kepercayaan untuk bekerja bersama, institusi yang memberi tempat bagi kelompok yang berbeda, media yang membantu memahami, serta kemampuan untuk mewariskan kepada generasi berikutnya cara mengelola perbedaan tanpa rasa takut.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak selesai di dalam buku ini. Ia akan ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari: dalam cara kita berbicara, mendengar, memperlakukan orang yang tidak sama, menggunakan ruang publik, dan membangun jaringan dengan mereka yang berada di luar lingkaran kita sendiri.

Pada akhirnya, hidup bersama tidak meminta manusia kehilangan identitasnya. Ia hanya meminta sesuatu yang jauh lebih sulit: tetap menjadi diri sendiri tanpa meniadakan hak orang lain untuk menjadi dirinya sendiri.

Mungkin di situlah keberagaman menemukan bentuknya yang paling sederhana sekaligus paling mendalam. Bukan hidup tanpa perbedaan, bukan hidup tanpa konflik, dan bukan hidup dalam keseragaman, melainkan hidup bersama tanpa harus menjadi seragam.

"Kedewasaan sebuah masyarakat tidak diukur dari hilangnya perbedaan, tetapi dari kemampuannya menjaga kemanusiaan ketika perbedaan tetap ada."

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hannan, & Mursyidi, A. F. (2023). Social media and the fragmentation of religious authority among Muslims in contemporary Indonesia. Digital Muslim Review, 1(2), 84–104. https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10

Amirrachman, A., Nubowo, A., & Khoirudin, A. (2015). Islam berkemajuan untuk peradaban dunia: Refleksi dan agenda Muhammadiyah ke depan. PT Mizan Pustaka.

Anggraeni, B. A., Malik, I., Arbiansyah, T. P. T., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). Internalisasi nilai multikultural Kampung Toleransi Paledang sebagai model pembangunan perdamaian dan benteng radikalisme. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(1), 2090–2100. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12635

Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press.

Auliya, N., & Pujawati, P. (2023). Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap peran keagamaan di tengah masyarakat kontemporer. Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies, 2(2), 119–128. https://doi.org/10.59029/int.v2i2.22

Azra, A. (2006). Indonesia, Islam, and democracy: Dynamics in a global context. Equinox Publishing.

Azwan, A., Syihabuddin, S., Wirza, Y., & Nur, A. M. (2025). Representasi pluralisme agama melalui visualisasi bahasa di ruang publik Kampung Toleransi Kota Bandung. Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, 16(2), 71. https://doi.org/10.24014/trs.v16i2.35785

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752

Berger, P. L. (1990). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. Anchor.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor.

Beyer, P. (2006). Religions in global society. Routledge.

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Polity Press.

Bruinessen, M. van. (2013). Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the conservative turn. Institute of Southeast Asian Studies.

Burhani, A. N. (2018). Pluralism, liberalism, and Islamism: Religious outlook of Muhammadiyah. Studia Islamika, 25(3), 433–470. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.7765

Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(1), 5–17. https://doi.org/10.1002/hbe2.149

Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.

Castells, M. (2009). The rise of the network society. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781444319514

Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age (2nd ed.). Wiley.

Chandra, A. R., & Budiyuwono, H. (2021). Adaptasi sosial dan pola permukiman di Kampung Toleransi Bandung. Riset Arsitektur (RISA), 5(2), 190–206. https://doi.org/10.26593/.v5i02.4733.190-206

Crossley, N. (2018). Social network analysis. In The Blackwell encyclopedia of sociology (pp. 1–8). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss170.pub2

Defriza, R., Harahap, S. M., & Hidayat, R. (2025). Islam and multiculturalism in building harmony in a diverse society. Scaffolding: Jurnal

Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 7(2), 1001–1015. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7784

Dhofier, Z. (2011). Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia (8th ed.). LP3ES.

Eickelman, D. F., & Piscatori, J. P. (2004). Muslim politics. Princeton University Press.

Faizin, B., Fitri, S. A., Enjang, A. S., Maylawati, D. S., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2024). Polarization of religious issues in Indonesia's social media society and its impact on social conflict. Journal of Applied Data Sciences, 6(1), 426–442. https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447

Fakhruroji, M. (2019). Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia. Contemporary Islam, 13(2), 201–215. https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9

Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies.

Feraswari, A. R., & Kustana, K. (2026). Tolerance villages in Bandung: Fostering interfaith harmony and multicultural awareness. Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 16(1), 197–210. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v16i1.49799

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Basic Books.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press.

Giddens, A. (2013). The consequences of modernity. Wiley.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds.). International Publishers.

Gunawan, A. (2017). Komunikasi lintas agama di Kampung Toleransi: Studi deskriptif Gang Luna Kampung Toleransi Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Prophetica: Scientific and

Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting, 1(1), 33–50.

Habermas, J. (2006). Religion in the public sphere. European Journal of Philosophy, 14(1), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x

Hall, S. (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. Sage Publications.

Hasan, N. (2009). The making of public Islam: Piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere. Contemporary Islam, 3(3), 229–250. https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9

Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia. Princeton University Press.

Hidayatulloh, T., Saumantri, T., & Kamarzaman, M. H. (2025). Religious habitus and adaptation in urban pluralism: A study of Tolerance Village, Bandung. Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, 34(2), 321–338. https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i2.3017

Koswara, E., & Viktorahadi, R. F. B. (2022). Religious pluralism in Indonesia's multicultural society. Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.59029/int.v1i1.6

Kymlicka, W. (1996). Multicultural citizenship. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198290918.001.0001

Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.

Malik, N. H. A., Huriani, Y., Waluyajati, R. S. R., & Kustana, K. (2025). Religious pluralism in theoretical perspective: Exploring concepts, relevance, and challenges in religious studies. Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 15(2), 309–322. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.48582

McGuire, M. B. (2008). Lived religion: Faith and practice in everyday life. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195172621.001.0001

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. Asian Studies Review, 42(3), 479–497. https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 42(1), 58–84. https://doi.org/10.1355/cs42-1c

Modood, T. (2019). Essays on secularism and multiculturalism. Rowman & Littlefield.

Mulyadi, M. (2017). Social process of ethnicity in urban area: Case study between Chinese ethnic and Sundanese ethnic in Bandung City. Jurnal Bina Praja, 9(2), 185–193. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.185-193

Nelson, J. C. (2013). Globalization and religious identity. Millah, 12(3), 23–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss3.art2

Nisa, E. F. (2018). Creative and lucrative daʿwa: The visual culture of Instagram amongst female Muslim youth in Indonesia. Asiascape: Digital Asia, 5(1–2), 68–99. https://doi.org/10.1163/22142312-12340085

Parekh, B. (2000). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Harvard University Press.

Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi kultural dalam resolusi konflik bernuansa agama di Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5(1). https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131

Qodir, Z. (2008). Kebhinekaan, kewargaan, dan multikulturalisme. Unisia, 31(68), 1–13. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art6

Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. Sage Publications.

Roy, O. (2010). Holy ignorance: When religion and culture part ways. Columbia University Press.

Saumantri, T. (2024). Moderasi beragama di tengah masyarakat plural: Studi Kampung Toleransi di Kota Bandung. Kontekstualita, 38(1), 27–44. https://doi.org/10.30631/38.01.27-44

Scholte, J. A. (2000). Globalization: A critical introduction. St. Martin's Press.

Shihab, A. (1997). Islam inklusif: Menuju sikap terbuka dalam beragama. Mizan.

Slama, M. (2017). A subtle economy of time: Social media and the transformation of Indonesia's Islamic preacher economy. Economic Anthropology, 4(1), 94–106. https://doi.org/10.1002/sea2.12075

Stepan, A. C. (2000). Religion, democracy, and the 'twin tolerations.' Journal of Democracy, 11(4), 37–57. https://doi.org/10.1353/jod.2000.0088

Syaripulloh, S., Alfarauq, F. A., & Mujtaba, S. T. (2025). Dinamika eksistensi agama pada ruang publik era globalisasi di Indonesia. Panalungtik, 8(2), 119–128. https://doi.org/10.55981/panalungtik.2025.14347

Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.

Thompson, K. (2017). Globalization and religion. In J. C. Alexander, R. N. Jacobs, & P. Smith (Eds.), The Oxford handbook of cultural sociology (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195377767.013.17

Turner, B. S. (2011). Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state. Cambridge University Press.

Wardi, U. (2026). Between tradition and digitality: The hybridity of Islamic identity among Indonesian millennial Muslims. AJIS: Academic

Journal of Islamic Studies, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.29240/ajis.v11i1.16645

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Zarkasyi, H. F. (2015). Modern pondok pesantren: Maintaining tradition in modern system. Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, 11(2), 223–248. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.267

.

MERAWAT KEBERAGAMAN DI ERA GLOBAL

Jaringan Intelektual Keagamaan dan Multikulturalisme

"Merawat keberagaman adalah merawat masa depan kehidupan bersama."

SINOPSIS

Buku ini membahas keberagaman bukan hanya sebagai fakta sosial, tetapi sebagai dinamika yang terus bergerak dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya mobilitas sosial, masyarakat Indonesia—termasuk Bandung sebagai salah satu kota dengan karakter majemuk—menghadapi tantangan baru dalam menjaga komunikasi, kepercayaan, dan kohesi sosial.

Buku ini menempatkan jaringan intelektual keagamaan sebagai salah satu kunci penting dalam merawat keberagaman. Produksi dan penyebaran pengetahuan keagamaan tidak lagi berlangsung dalam satu jalur, melainkan melalui banyak simpul: perguruan tinggi, pesantren, organisasi keagamaan, komunitas, tokoh agama, akademisi, generasi muda, dan media digital. Jaringan ini dapat menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, dan kolaborasi sosial apabila dikelola secara terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang reflektif dan kontekstual, buku ini mengulas bagaimana agama, budaya lokal, media digital, ruang publik, dan pengalaman masyarakat urban berinteraksi dalam membentuk cara masyarakat memahami dan menjalani perbedaan. Toleransi tidak dipahami sekadar sebagai slogan atau kegiatan seremonial, tetapi sebagai pengalaman sosial yang nyata melalui dialog, perjumpaan, kerja sama, literasi, serta keterlibatan masyarakat.

Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca melihat bahwa masyarakat yang majemuk tidak membutuhkan keseragaman, tetapi kemampuan untuk mengelola perbedaan secara bermartabat. Keberagaman adalah kenyataan yang harus dirawat melalui kepercayaan, komunikasi, pengetahuan, dan kesediaan untuk terus membuka ruang perjumpaan.

POKOK BAHASAN

- Keberagaman dalam perspektif sosial dan agama
- Jaringan intelektual keagamaan
- Multikulturalisme dan kehidupan bersama
- Agama, budaya lokal, dan masyarakat urban
- Globalisasi, teknologi digital, dan dinamika keberagaman
- Dialog, toleransi, dan ruang publik
- Peran perguruan tinggi, pesantren, dan organisasi keagamaan
- Media digital dan produksi pengetahuan keagamaan
- Kearifan lokal sebagai modal sosial
- Strategi merawat keberagaman di era global

MedPro™ MEDIA PUBLIKASI PROFESIONAL

CV. Media Publikasi Profesional
Pasirjati, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40616
media.publikasiprofesional@gmail.com
https://www.medpro.web.id

ISBN 978-634-05-7463-0 (PDF)